

e-news letter

MAR | 2020

PKS PARLEMEN

KREATIF SUBSTANTIF

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M

Omnibus Law **IMPOR PANGAN**

Tak Boleh Jadi Sumber
Penyediaan Pangan

Aneh, Berdiri diatas Kaki Importasi

Kebijakan impor sesungguhnya merupakan salah satu cara 'cari aman' dalam menekan gejolak harga pasar akibat adanya turbulensi demand dan supply yang tidak seimbang. Semacam amoksilin yang sekilas nampak menyembuhkan, padahal tidak benar-benar menyelesaikan persoalan utama; kesejahteraan petani dan daya beli masyarakat.

Kita terhentak keras, akhir pekan Jumat (6/3/2020) Pemerintah mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) mengenai pangan yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memutuskan pemerintah akan mempercepat importasi sejumlah produk pangan jelang bulan puasa.

Ingatan kita terlempar ke masa kampanye, Presiden Jokowi pernah berjanji akan membatasi Importasi produk pangan untuk mengutamakan petani dalam negeri?

Mari kami bantu mengingatkan kapan dan dimana Janji itu disampaikan. Tahun 2014

dalam kampanye di Gedung Pertemuan Assakinah, Cianjur, Jawa Barat "Kita harus berani stop impor pangan. Stop impor beras, stop impor daging, stop impor kedelai, stop impor sayur, stop impor buah, stop impor ikan. Kita ini semuanya punya kok," kala itu Jokowi berorasi.

Okelah mari kita lupakan janji lawas itu.

Bukankan tidak boleh ada visi selain milik Presiden, lalu mengapa kemudian ada misi yang tidak sesuai dengan arahan dan kampanye. Kemudian kita bertanya, sesungguhnya mereka sedang berkerja untuk



sia pa? Untuk rakyat Indonesia atau untuk rakyat mengimpor komoditas pangan.

Padahal sejumlah fakta terpapar dari kebijakan 'ugal-ugalan' importasi beberapa tahun ini, yang tidak jauh terkait busuknya hampir 20 ribu ton beras di gudang bulog pada akhir Desember tahun 2019.

Kebijakan impor sesungguhnya merupakan salah satu cara 'cari aman' dalam menekan gejolak harga pasar akibat adanya turbulensi permintaan (demand) dan penawaran (supply) yang tidak seimbang. Semacam amoksilin atau obat

periode pertama tidak tercapai sama sekali.

Dalam jangka panjang, pemerintah bersikeras mendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law, dimana persoalan pangan tidak luput dari pasal-pasal yang akan di deregulasi. Pasal bermasalah di bidang pangan salah satunya terkait importasi pangan. RUU Omnibus Law saat ini sungguh menjadi 'barang' baru nan aneh, lebih bin ajaib RUU ini bukan hanya menakutkan namun juga penuh misteri dalam proses penyusunannya. Dari apa yang disampaikan oleh Pemerintah, RUU Omnibus Law kemudian teresonansi secara viral diruang publik sebagai sebuah jalur cepat (fast track) dalam bidang regulasi untuk mendongkrak investasi. Apapun yang menghalangi proses hadirnya investasi, maka akan berhadapan dengan Omnibus Law. Sebuah pola kerja dan metode pendekatan yang nampak lazim digunakan oleh Pemerintah saat ini, meski kemudian di sejumlah titik menuai polemik dan memantik masalah prinsipil.

Cukup, jangan banyak gaya. Karena kerja lebih penting dibanding gaya.

Humas Fraksi PKS DPR RI

padahal tidak benar-benar menyelesaikan persoalan utama; kesejahteraan petani dan daya beli masyarakat. Demikianlah pola pragmatis berkerja, ilmu "pokok"-nya menjadi utama dan dikemas serasional mungkin. Tidak peduli apakah kebijakan itu pada akhirnya berdampak atau tidak pada petani sebagai simpul pertama proses produksi pangan, semacam 'tuna empati'. Perlu dicatat swasembada empat komoditas pangan di era pemerintahan Presiden Jokowi

Omnibus Law Cipta Kerja

Impor Pangan Tak Boleh Jadi Sumber Penyediaan Pangan

Kita tidak boleh terpengaruh dari lobi luar dimana negara kita masih lemah dalam ketahanan pangan.

Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P.,M.M

Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta (01/02) — Regulasi tentang pangan yang terdampak akibat Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja salah satunya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan. Anggota DPR RI Komisi IV, Andi Akmal Pasluddin sangat menyayangkan pada draft RUU Cipta Kerja tersebut, impor pangan sebagai salah satu sumber pangan di seajarkan dengan produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan nasional.

"Ini sama saja negara kita menyerah, tidak mau berfikir dan malas bekerja untuk mengoptimalkan kekuatan sumber daya alam pangan kita yang melimpah untuk memenuhi kebutuhan umat manusia. Regulasi yang tersayat akibat pasal tentang impor

pangan di omnibuslaw cipta kerja langsung pada dua undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani", ungkap Akmal.

Legislator asal Sulawesi Selatan II ini mengakui, Omnibus Law Cipta Kerja banyak membuat gebrakan-gebrakan. Namun khusus masalah pasal tentang impor pangan ini, ia mengatakan gebrakannya membangun instrumen kemunduran bangsa.

Ia mencontohkan, fakta sejarah masa lalu, peningkatan produksi gula nasional tahun 2000 hingga 2008 adalah nyata akibat dari meningkatnya luas areal tebu lebih dari 80 ribu ha. Produktivitas tebu

sama saja tidak ada yang spesial yang menunjukkan ada kontribusi petani yang signifikan untuk menanam tebu pada areal yang mencukupi. Kini area tanam tebu menurun akibat regulasi yang membuat bingung petani. Para Petani seolah sulit lagi berharap dari menanam tebu, karena tidak ada jaminan harga dan pasar yang jelas. Pasca tahun 2008, produksi gula terus turun hingga sekarang yang mengakibatkan industri makanan dan minuman negara ini menuju net impor terhadap gula.

Pada tahun 2016, lanjut akmal, riset literatur komprehensif yang mempelajari kejadian di tahun 2010, bahwa dampak impor terhadap gula sebanyak 3 juta ton, telah menghilangkan kesempatan kerja sebanyak 2,3 juta petani tebu. Ini kita baru bicara gula, bagaimana bila mengurangi persoalan Beras, Garam, Hortikultura, daging dan lain-lain, maka akan semakin mengkhawatirkan persoalan impor pangan ini.

"Kita tidak boleh



terpengaruh dari lobi luar dimana negara kita masih lemah dalam ketahanan pangan. Betul bahwa negara kita hingga saat ini masih rendah ketahanan pangannya. Peringkat ke-62 dari 113 negara dalam Indeks Ketahanan Pangan Global merupakan bukti nyata negara kita masih rentan terhadap ketahanan pangan. Hingga saat ini sebanyak 22 juta orang Indonesia menderita kelaparan.

Dan fenomena yang terjadi saat ini 9 juta anak Indonesia yang berusia di bawah lima tahun masih menderita malnutrisi, berat badan rendah, dan stunting. Tapi kondisi miris negara kita solusinya bukan impor pangan, tapi inovasi membangun infrastruktur kuat pada kelimpahan pangan yang bisa kita hasilkan dalam negeri", jelas Politisi PKS ini.

DPR Tolak Impor dan Minta Tingkatkan Pembelian Produksi Petani

Penambahan impor ini tidak masuk akal, sebab pemerintah sebelumnya telah menerbitkan surat Perizinan Impor (SPI) untuk 438.802 ton kristal mentah (raw sugar). Situasi ini terlihat nyata ada regulasi yang tidak terkontrol pada implementasinya. inilah, menurut dia yang menjadi sumber polemik di masyarakat terutama komunitas petani tebu rakyat mulai dari petani hingga asosiasinya.

drh. H. SLAMET

Anggota Komisi IV DPR RI

Sukabumi (07/03) — Keluhan Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) atas bulog dan pemerintah yang tidak membeli hasil produksi gula mereka tetapi malah mengusulkan impor gula hingga 200.000 ton. Kondisi ini mendapat respon anggota Komisi IV DPR RI yang juga ketua kelompok Komisi IV FPKS DPR, drh. S.Lamet.

“Pemerintah seharusnya

menyerap hasil produksi petani, bukan justru memilih impor ketika stok pada petani berkecukupan”. tegas oleh Slamet.

Politisi PKS ini menyuarakan, bahwa penambahan impor ini tidak masuk akal, sebab pemerintah sebelumnya telah menerbitkan surat Perizinan Impor (SPI) untuk 438.802 ton kristal mentah (raw sugar). Situasi ini

terlihat nyata ada regulasi yang tidak terkontrol pada implementasinya. inilah, menurut dia yang menjadi sumber polemik di masyarakat terutama komunitas petani tebu rakyat mulai dari petani hingga asosiasinya.

Slamet yang merupakan anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat IV ini mengingatkan pemerintah untuk berpegang pada ketentuan yang ada pada Undang-undang no. 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Bila pemerintah sendiri yang menganggap peraturan regulasi kenegaraan, maka undang-undang ini akan kehilangan kewibawaanya.

“Undang-undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani telah secara secara jelas menyebutkan bahwa kebutuhan pangan nasional, dipenuhi dengan memprioritaskan produksi pertanian dalam negeri. Oleh karena itu, langkah yang dilakukan oleh pemerintah secara jelas telah melanggar ketentuan perundangan”, tegas Slamet.

Legislator Sukabumi ini



melanjutkan, bahwa petani kita punya kemampuan untuk memproduksi berbagai komoditas. Namun, menurutnya, kemampuan saja tidak cukup melainkan harus dibarengi oleh political will (kemauan politik). Anggota DPR yang menjadi mitra Kementerian Pertanian dan Bulog ini menyampaikan bahwa Kita (Indonesia) mampu swasembada atas banyak komoditas, padi-jagung-kedelai-gula-bawang dan lain

sebagainya.

“Kebijakan ekonomi dan politik pemerintah yang pro impor akan menjadi risiko bagi keberlanjutan pertanian. Padahal kita sangat mungkin untuk memenuhi kebutuhan produk pangan yang melimpah dari dalam negeri asalkan keberpihakan pada petani merupakan hal yang utama” pungkasnya”.

Foto : dpr.go.id

Atasi Persoalan Bawang Putih:

Kurangi Impor dan Lakukan Pengembangan Bawang Putih Nasional

Untuk mengatasi persoalan bawang putih, saatnya pemerintah harus mengurangi impor dan segera melakukan pengembangan bawang putih nasional secara terpadu

H. JOHAN ROSIHAN, S.T.

Anggota Komisi IV DPR RI

Anggota Komisi IV DPR RI, H. Johan Rosihan pada beberapa waktu yang lalu, yakni awal Maret 2020 telah melakukan kunjungan reses bersama Komisi IV DPR RI di Kawasan sentra bawang putih di Sembalun Lombok dan di Temanggung Jawa Tengah untuk menyaksikan secara langsung kondisi budidaya bawang putih yang dilakukan oleh petani kita. Dari kunjungan tersebut terlihat jelas tingginya antusiasme dan semangat para petani untuk mengembalikan kejayaan bawang putih nasional seperti era tahun 80-an, namun pada saat yang bersamaan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan telah menerbitkan izin impor bawang

putih sebanyak 34,8 ribu ton. Anggota DPR RI asal Pulau Sumbawa ini merasakan kebijakan impor ini sebagai kebijakan "ugal-ugalan" karena telah menciderai apa yang pernah diingatkan oleh Bung Karno bahwa "jangan serahkan selera lidahmu kepada bangsa asing", dan yang pasti kebijakan impor yang terus-menerus ini akan melemahkan kegairahan petani lokal dalam proses budidaya bawang putih.

Berdasarkan data BPS Sejak Bulan April sampai Desember 2019 lalu, pemerintah telah melakukan realisasi impor bawang putih sebanyak 465.344 ton dan produksi bawang putih nasional hanya sebesar 73.331 ton.

Sedangkan perkiraan kebutuhan bawang putih per tahun adalah 540.491 ton, makanya kebijakan impor saat ini sebanyak 34,8 ribu ton bawang putih pada awal tahun 2020 ini adalah sebagai kebijakan "ugal-ugalan" yang tidak berpihak pada kepentingan nasional, ujar Johan.

Anggota DPR RI dapil NTB 1 ini berpendapat bahwa untuk mengatasi persoalan bawang putih, saatnya pemerintah harus mengurangi impor dan segera melakukan pengembangan bawang putih nasional secara terpadu. Johan mencontohkan pada tahun 2016 luas panen dari bawang putih sebesar 2.407 Ha dan pada tahun 2017 menurun menjadi 2.146 Ha dan ternyata bisa ditingkatkan lagi pada tahun 2019 menjadi 11.010 Ha luas panen, artinya ke depan jika pemerintah lebih serius dan kerja keras untuk meningkatkan angka produktivitas dari komoditi bawang putih maka akan mampu mengurangi impor dan bisa memenuhi kebutuhan domestic. Johan mendorong



agar pemerintah meningkatkan anggaran untuk pengembangan budidaya bawang putih nasional, diantaranya misalnya dengan penggunaan benih bersertifikat, pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) serta mulsa plastic. Di sisi lain juga perlu dilakukan perluasan Kawasan bawang putih sesuai dengan potensi geografis daerah sebagai sentra budidaya bawang putih nasional.

H Johan Rosihan selaku wakil rakyat telah mengkritik keras terhadap rendahnya produktivitas bawang putih yang terus menurun setiap tahun, baginya ini adalah bentuk kegagalan pemerintah dalam membina petani dan kurang serius mengembangkan Kawasan bawang putih nasional.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Dr. H. Jazuli Juwaini, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI

Fraksi PKS Instruk-sikan Anggotanya Bantu Edukasi Cegah Corona

Jangan anggap remeh virus ini karena semua negara terdampak menerapkan protokol kesehatan yang sangat serius. Himbauan agar rakyat tidak panik sudah benar. Tapi jangan sampai menyederhanakan masalah apalagi jika ada kesan menutupi dan menolak mengakui (denial) sehingga menurunkan kewaspadaan masyarakat

Fraksi PKS Instruksikan Anggotanya di Pusat dan Daerah

Bantu Edukasi Cegah Corona dan Awasi Kesiapsiagaan Faskes Pemerintah

Jangan anggap remeh virus ini karena semua negara terdampak menerapkan protokol kesehatan yang sangat serius. Himbuan agar rakyat tidak panik sudah benar. Tapi jangan sampai menyederhanakan masalah apalagi jika ada kesan menutupi dan menolak mengakui (denial) sehingga menurunkan kewaspadaan masyarakat

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

Jakarta (3/3) - Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menginstruksikan seluruh Anggota Fraksi PKS dari pusat sampai Kota/Kabupaten siaga virus corona dengan membantu mengedukasi warga masyarakat di dapilnya untuk memiliki kesadaran hidup sehat, hidup bersih, untuk menghindari penyakit corona dan penyakit lainnya.

"Di samping itu, Fraksi PKS

juga memerintahkan seluruh anggota DPR/DPD mengontrol kesiapsiagaan instansi pemerintah dan fasilitas kesehatan dalam mengatasi dan memitigasi potensi persebaran virus corona. Kita ingin kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat semakin kuat atas kasus ini," ungkap Jazuli. Jazuli Juwaini meminta Pemerintah lebih terbuka dan

informatif terkait virus corona (Covid-19). Jangan ada lagi informasi yang tidak jelas dan simpang siur antarkementerian dan antarpemerintah daerah.

Setelah pengumuman resmi ada 2 WNI suspect corona, Jazuli meminta pemerintah harus memberikan informasi sejelas-jelasnya, detil, dan terarah dalam mitigasi dan penanganan agar virus tidak meluas.

Selain itu, Jazuli meminta pengawasan dan pemeriksaan lalu lintas bandara dan pelabuhan diperketat sesuai protokol WHO karena tidak sedikit yang mengatakan pemeriksaan kesehatan bandara dan pelabuhan kita terlalu longgar, bahkan pemerintah justru sempat mempromosikan pariwisata dengan diskon tiket pesawat dll.

"Jangan anggap remeh virus ini karena semua negara terdampak menerapkan protokol kesehatan yang sangat serius. Himbuan agar rakyat tidak panik sudah benar. Tapi



jangan sampai menyederhanakan masalah apalagi jika ada kesan menutupi dan menolak mengakui (denial) sehingga menurunkan kewaspadaan masyarakat," ungkap Jazuli.

Anggota Komisi I DPR ini punya alasan mengingatkan pemerintah karena sebelumnya sempat terjadi simpang siur informasi perihal masuknya virus corona ke Indonesia. Sejumlah daerah dikatakan mendeteksi dan menyelidiki pasien diduga corona, tapi terkesan ada upaya menutupi dan 'penyangkalan'. Sebelunya, sejumlah negara meragukan klaim Indonesia bebas corona.

"Sekarang pemerintah telah mengumumkan 2 orang positif terinfeksi corona. Perlu langkah-langkah terukur, sesuai protokol kesehatan, untuk

memitigasi persebarannya. Mendeteksi semua potensi dari interaksi yang dilakukan oleh pasien serta memperketat protokol kesehatan di bandara dan pelabuhan karena nyatanya dua WNI tersebut terinfeksi dari WNA yang datang ke Indonesia," tegas Jazuli.

Anggota DPR Dapil Banten ini meminta Pemerintah serius menginstruksikan seluruh jajaran Kemenkes sampai ke Puskesmas-Puskesmas untuk tanggap dan responsif (aware) terhadap masyarakat yang terkena batuk dan flu. Cermati betul-betul indikasi yang mengarah pada potensi corona.

"Ini bagian dari tanggap bencana dan upaya memperkuat ketahanan kita dari ancaman penyakit yang menjadi keprihatinan dunia internasional saat ini," pungkas Jazuli.

Komisi I DPR Bentuk Panja Corona, Fokus Isu Ketahanan Nasional

Pelibatan militer dalam penanganan virus corona juga dilakukan di negara-negara lain yang terpapar. Namun, Bukan berharap jadi besar. Tapi maksud kami agar jika nanti besar penanganan oleh mitra-mitra Komisi I bisa sigap dan siaga dengan prosedur dan mekanisme yang benar

Dr. ABDUL KHARIS A, SE. M.Si.Akt

Wakil Ketua Komisi I DPR RI

Jakarta (05/03) — Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari menyatakan pembentukan panitia kerja (Panja) terkait virus corona fokus pada isu ketahanan nasional.

Kharis menyebutkan Komisi I DPR yang membidangi urusan pertahanan, komunikasi, dan luar negeri berharap para mitra kerja akan tanggap jika wabah virus corona di dalam negeri meluas.

"Kami melihatnya dari aspek ketahanan nasional

sebagai langkah antisipasi jika nanti wabah corona membesar," kata Kharis saat dihubungi Kompas.com, Rabu (4/3/2020).

Ia mengatakan koordinasi terkait ketahanan nasional ini khususnya dengan TNI dan BIN.

Menurutnya, pelibatan militer dalam penanganan virus corona juga dilakukan di negara-negara lain yang terpapar.

Namun, Kharis menegaskan Komisi I tentu berharap wabah virus corona di

dalam negeri terkendali.

"Bukan berharap jadi besar. Tapi maksud kami agar jika nanti besar penanganan oleh mitra-mitra Komisi I bisa sigap dan siaga dengan prosedur dan mekanisme yang benar," tuturnya.

"Mereka harus terlatih. Jangan sampai membantu dan menolong tapi mereka jadi korban. Lalu dari aspek anggaran juga mesti kami perhatikan," lanjut Kharis.

Sementara itu, pelibatan BIN dalam hal ini untuk memetakan langkah pencegahan dan pengendalian yang strategis.

Kharis menegaskan Panja Virus Corona menitikberatkan pada aspek preventif.

"Kami juga akan melihat dari aspek preventif dan antisipasi yang lebih strategis dengan BIN. Misal, prediksinya seperti apa untuk menekan kemungkinan terjadinya wabah membesar. Jadi lebih pada antisipasi. Bukan pada aspek virus corona-nya. Ini menyangkut ketahanan



nasional," kata dia.

Ia pun menyatakan Panja Virus Corona mulai bekerja sesuai masa reses DPR yang akan berakhir pada 23 Maret 2020.

Disebutkan, Panja Virus Corona dibentuk pada akhir Februari lalu menjelang masa reses DPR.

"Mungkin nanti setelah reses (mulai kerja). Karena kami bukan pada aspek wabah, tapi ketahanan. Kami ketika reses juga ada kunjungan ke berbagai Kodam. Kami selipkan kesiapan antisipasi hal-hal seperti ini," ujar Kharis.

Foto : dpr.go.id

Sukamta: Pentingnya Edukasi Pencegahan dan Penanganan Pasien Covid-19

Kita ikut prihatin dengan masuknya Covid 19 ke Indonesia ini. Kita berharap Pemerintah segera mengambil langkah langkah taktis untuk menanggulangi penyebarannya dan melakukan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat lebih siap dan paham dalam melakukan pencegahan penularan virus ini

H. SUKAMTA, Ph.D.

Anggota Komisi I DPR RI

Jakarta (03/02) — Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyatakan setelah pemerintah mengumumkan 2 orang Warga Negara Indonesia terinfeksi virus Corona, edukasi pencegahan dan penanganan pasien Covid-19 merupakan hal terpenting.

"Kita ikut prihatin dengan masuknya Covid 19 ke Indonesia ini. Kita berharap Pemerintah segera mengambil langkah langkah taktis untuk menanggulangi penyebarannya dan melakukan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat

lebih siap dan paham dalam melakukan pencegahan penularan virus ini," dorong anggota dewan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

Sukamta berharap langkah- pencegahan wabah dilakukan dengan taktis, cerdas, tidak membuat gaduh tetapi efektif dalam mendidik masyarakat.

"Pemerintah juga perlu menyiapkan kondisi terburuk kalau terjadi wabah, ruang isolasi dengan semua fasilitasnya perlu disiapkan di semua daerah," harap wakil

ketua fraksi PKS DPR RI.

"Kita berharap dan berdoa semoga di Indonesia penyebaran bisa dibatasi dan dikelola dengan baik. Namun kita perlu mempersiapkan diri dengan semaksimal mungkin. Hope for the best and prepare for the worst," pesan Sukamta.

Presiden Joko Widodo mengumumkan adanya dua orang di Indonesia yang positif terjangkit, dua warga negara Indonesia (WNI) tersebut sempat kontak dengan warga negara Jepang yang datang ke Indonesia.





FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Distribusi KTP-el di Sulsel Masih Bermasalah

Teddy Setiadi, S.I.Kom.
Anggota Komisi II DPR RI

Ini jumlah yang cukup besar sebenarnya, jika dibandingkan dengan 6,3 juta yang sudah dilakukan perekaman. Apalagi Dirjen Dukcapil sudah mengatakan bahwa blangko KTP-el sudah terpenuhi dan melarang seluruh Disdukcapil menerbitkan Suket sebagai pengganti KTP-el,

Distribusi KTP-el di Sulsel Masih Bermasalah

Ini jumlah yang cukup besar sebenarnya, jika dibandingkan dengan 6,3 juta yang sudah dilakukan perekaman. Apalagi Dirjen Dukcapil sudah mengatakan bahwa blangko KTP-el sudah terpenuhi dan melarang seluruh Disdukcapil menerbitkan Suket sebagai pengganti KTP-el,

TEDDY SETIADI, S.I.Kom.

Anggota Komisi II DPR RI

Tim Kunjungan Kerja DPR Komisi II DPR RI masih menemukan adanya masalah distribusi blangko KTP-el di Sulawesi Selatan (Sulsel). Menurut data, kebutuhan blangko KTP-el yang sudah terekam sekitar 400 ribu lebih, belum ditambah dengan perekaman baru. Padahal, sebentar lagi di wilayah ini akan dilaksanakan Pilkada serentak.

"Ini jumlah yang cukup besar sebenarnya, jika dibandingkan dengan 6,3 juta yang sudah dilakukan perekaman. Apalagi Dirjen Dukcapil sudah mengatakan bahwa blangko KTP-el sudah terpenuhi dan melarang seluruh Disdukcapil menerbitkan Suket sebagai pengganti KTP-el," kata

Anggota Komisi II DPR RI Teddy Setiadi di Makassar, Sulsel Senin (2/3/2020).

Menurutnya, persoalan distribusi blangko KTP-el ini juga menyangkut identitas warga negara berkaitan juga dengan wibawa pemerintah. Ada korelasi juga dengan Pilkada serentak di 12 kota kabupaten kota se-Sulsel, karena Dirjen Dukcapil mengatakan, suket tidak berlaku lagi untuk pencoblosan, tapi berlaku bagi yang sudah terekam data, namun belum mendapat KTP-el.

"Saya berharap ini harus segera diselesaikan. Tadi kita temukan ada persoalan pada blangkonya dan peralatan mesin printer untuk mencetak

KTP-el. Kalau misalnya satu kabupaten kota terdapat ribuan suket yang ingin jadi KTP-el, berarti harus ada mesin cetak yang berkemampuan lebih. Kalau tidak, terjadi daftar antrean lagi dan itu terus dikeluhkan oleh masyarakat," ujarnya

la meminta pemerintah daerah dan Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini dirjen dukcapil, segera mendistribusikan blangko KTP-el. Kemudian dengan supporting sistem-nya juga harus bagus, sehingga nanti tidak ditemukan lagi persoalan-persoalan KTP-el yang masih mengemuka di lapangan. (jk/es)



DPR: Regulasi Dulu Jadi, Baru Badan Otorita IKN

“Landasan Hukumnya apa pembentukan Badan Otorita ini? pembahasan lebih lanjut di Parlemen sampai RUU IKN disepakatai saja belum ada, masa sudah lompat buat peraturan presiden (perpres) badan otorita?”

Dr. H. MARDANI, M.Eng.

Anggota Komisi II DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera mengeritik pembentukan Badan Otoritas Ibu Kota Negara (IKN) oleh Presiden Jokowi ketika yang disampaikan pada, Senin (2/3/2020) di Kompleks Istana Negara lalu.

“Landasan Hukumnya apa pembentukan Badan Otorita ini? pembahasan lebih lanjut di Parlemen sampai RUU IKN disepakatai saja belum ada, masa sudah lompat buat peraturan presiden (perpres) badan otorita?” ujar Mardani, Jumat (7/3).

Lebih lanjut Ketua DPP PKS ini mengatakan terlalu dipaksakannya segala sesuatu sehingga semua dilabrak, “Ini terkesan terlalu dipaksaka ya? segala sesuatu padahal harus

sesuai prosedur hukum dan kajian masih mentah,” kata Mardani.

Ia menyelaskan hal ini terjadi. Menurutnya proses dan tahapan pembuatan suatu kebijakan itu mestinya bukan masalah kejar tayang saja terlebih lagi terkait kebijakan besar kedepannya masalah pemindahan ibu kota negara, “Mohon dipertimbangkan hal ini,” ujar Mardani.

Lebih jauh Ia juga mendo-rong pentingnya keterbukaan dan pelibatan publik dalam kebijakan strategis seperti ini sehingga tidak digugat publik karena cacat hukum, “Jagalah asal sembarang kebut tanpa taat prosedur hukum, di era keterbukaan ini informasi gampang di dapat, publik bisa

menggugat.” Kata Mardani.

Mardani berharap Presiden memoderasi kebijakannya karena tidak taat prosedur hukum, “Mohon maaf pak presiden, ini habitus politik yang kurang baik. sebaiknya bapak perlu moderasi terkait dipaksakannya pembentukan Badan Otoritas IKN ini. kita ini negara hukum, negara bukan kerajaan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan telah mengantongi empat nama yang akan menjadi kandidat kepala Badan Otorita IKN di Istana negara, Senin (2/3) lalu dan menyatakan akan membuat persers yang akan segera ia tanda tangani.

Foto : dpr.go.id



Kasus Pelanggaran HAM Tak Tuntas, Nasir Djamil: Negara Masih Ambigu

"Komisi tiga DPR selama ini sangat intens mendorong upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM, bahkan kita berusaha untuk memfasilitasi Kejaksaan Agung agar bisa melaksanakan rapat tripartit dengan Komnasham

H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, M.SI

Anggota Komisi III DPR RI

Lhokseumawe (05/03) — Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Nasir Djamil menyototi terkait belum tuntasnya penyelesaian berbagai kasus Pelanggaran HAM di Indonesia akibat dari masih ambigunya pemahaman beberapa kalangan, termasuk pemerintah dalam upaya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Hal itu disampaikan Nasir Djamil saat menjadi salah satu narasumber pada acara Seminar Nasional dengan tema Revitalisasi Pancasila Dalam Penyelesaian Korupsi dan

Pelanggaran HAM di Indonesia Pada Era Post-Truth dalam rangkaian kegiatan Unimal Constitutional Week yang berlangsung di GOR Unimal, Cunda, Lhokseumawe (04/03/2020).

Menurut Nasir, selama ini sudah banyak upaya yang dilakukan lembaga-lembaga terkait, termasuk DPR untuk mendorong agar kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu bisa diselesaikan secara tuntas demi menghadirkan rasa keadilan bagi para korban. Namun kenyataannya sampai hari ini belum juga selesai.

"Komisi tiga DPR selama ini sangat intens mendorong upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM, bahkan kita berusaha untuk memfasilitasi Kejaksaan Agung agar bisa melaksanakan rapat tripartit dengan Komnasham". papar Nasir.

Penyebabnya menurut politisi PKS ini adalah karena negara ambigu dalam memahami penyelesaian kasus pelanggaran HAM.

"Kita pernah membuat KKR namun telah di hapuskan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga tenggallah KKR di Aceh saja", ujarnya.

Selanjutnya menurut Nasir pemerintah saat ini masih gamang dalam mengupayakan penyelesaian kasus pelanggaran HAM.

"Ada kubu yang ingin kasus pelanggaran HAM diselesaikan secara yudisial, namun ada juga kubu yang ingin diselesaikan secara non yudisial." ungkapnya.

Oleh karena itu, ketua FORBES anggota DPR/DPD RI asal Aceh itu berharap agar



Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh bisa menjadi model penyelesaian kasus pelanggaran HAM bagi Aceh dan Indonesia.

"Kita beruntung di Aceh ada KKR, bayangkan kalau tidak ada, maka akan hilang semua sejarah kelam yang belum terungkap. Semoga KKR Aceh bisa menjadi model penyelesaian HAM bagi Aceh dan Indonesia," sebut Nasir.

Selanjutnya khusus untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Aceh, menurut Nasir, ia mendorong adanya penguatan regulasi untuk memastikan KKR Aceh

bisa melakukan tugas-tugas teknis seperti upaya rehabilitasi, restitusi & rekonsiliasi antara korban dan pelaku.

"Kita sedang mendorong agar ada penguatan regulasi yang mengatur secara jelas terkait peran KKR Aceh dalam upaya rehabilitasi, restitusi dan rekonsiliasi." tutup Nasir Djamil.

Selain Nasir Djamil, acara seminar nasional juga diisi oleh narasumber lainnya, yaitu Wakil Ketua DPR bidang Korpolkam, Azis Syamsuddin, Mantan Komisioner Komnasham Natalius Pigai dan Perwakilan dari KPK RI Fadhlil Nasution.

Masa Reses, Habib Aboe Tinjau Kesiapan Imigrasi Hadapi Corona

Kehadiran saya untuk meninjau kesiapan Imigrasi Kalimantan Selatan, terhadap kedatangan TKA China dalam kaitannya dengan merebaknya virus Corona”

HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI

Anggota Komisi III DPR RI Dapil Kalsel I

Banjarmasin (04/03) — Pada masa reses Anggota DPR RI Fraksi PKS Aboe Bakar Alhabsyi mendatangi kantor Imigrasi Kalimantan Selatan, Rabu, (04/03/2020).

Kedatangan pria yang akrab disapa Habib Aboe ini guna memastikan kesiapan kantor Imigrasi dalam menghadapi virus Corona.

“Kehadiran saya untuk meninjau kesiapan Imigrasi Kalimantan Selatan, terhadap kedatangan TKA China dalam

kaitannya dengan merebaknya virus Corona”, ungkap Habib Aboe.

Bendahara Fraksi PKS ini mengatakan hingga saat ini ada 139 TKA China yang datang sebelum virus Corona menyebar.

“Sampai saat ini ada 12 orang yang izin tinggalnya habis. Mereka terpaksa mendapat fasilitas izin tinggal karena tidak bisa kembali ke negaranya lantaran tak ada penerbangan”,



Persoalan Pupuk Tak Kunjung Selesai, Langkah Besar Perlu Dilakukan

“Saya berharap ada upaya signifikan terhadap penyelesaian pupuk bersubsidi ini. Semoga tahun 2020 ini, pemerintah mampu membereskan permasalahan pupuk bersubsidi

Drs. HAMID NOOR YASIN, M.M

Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta (05/03) — Di masa reses, Anggota DPR RI Asal Jawa Tengah IV, Hamid Noor Yasin banyak mendapat keluhan dari berbagai masyarakat petani terutama di papilnya, berkaitan dengan persoalan pupuk subsidi yang hingga kini belum baik pengelolannya.

"Masih terjadi masalah fundamental pada distribusi pupuk bersubsidi di kalangan petani. Padahal Pupuk subsidi memiliki peranan penting dan strategis dalam meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian. Saya akan terus menyuarakan agar pemerintah mengelola pupuk ini agar efisien baik secara teknis, penyediaan, distribusi dan harga melalui subsidi", kata Hamid.

Hamid menjelaskan, tahun lalu persoalan pupuk subsidi terjadi akibat blokir atau penghentian pupuk bersubsidi di beberapa wilayah Indonesia, merupakan salah satu pemicu kisruhnya pengelolaan distribusi pupuk bersubsidi secara nasional.

Pada tahun 2020 ini, persoalan pupuk subsidi akan menghadapi tantangan ketersediaan yang tepat dengan prinsip 6T yakni, tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, tepat harga dan tepat lokasi.

Tantangan persoalan pupuk subsidi tahun 2020, Lanjut Hamid, akan dipicu pada turnnya alokasi anggaran pupuk subsidi dibandingkan tahun 2019. Anggaran Pupuk

subsidi tahun 2019 sebesar 9,55 juta ton senilai Rp. 29 triliun. Sedangkan alokasi tahun 2020 sebesar 7,94 juta ton dengan nilai Rp 26,6 triliun. Meski menteri pertanian menjamin akan memperbaiki sistem ketersediaan dan penyaluran pupuk subsidi diberbagai daerah, namun mesti diakui bahwa keluhan petani banyak bersuara terkait belum baiknya tata kelola pupuk subsidi ini.

"Saya mendengar sendiri dari petani-petani yang saya temui di berbagai daerah, baik di dapil maupun di wilayah lain saat kunjungan kerja bahwa tata kelola distribusinya masih ambarudul menaul protes dari petani-petani di tingkat bawah. Perlu langkah kongkrit yang memadai, agar persoalan pupuk ini semakin baik yang berujung pada produktivitas pertanian kita meningkat sehingga persoalan impor pangan yang selama ini terjadi dapat ditekani", jelas dia.

Politisi PKS ini mengingatkan kepada pemerintah, bahwa tahun lalu ada prestasi pemerintah pada distribusi pupuk bersubsidi sebesar 6.026.667 ton pupuk



bersubsidi hingga hingga 11 September 2019, setara 68 persen dari alokasi penyaluran pupuk bersubsidi di tahun 2019. Namun dengan upaya yang besar seperti ini pun, kepuasan masyarakat terutama para petani jauh dari harapan. Banyak rakyat mengeluh terkait dengan masalah pendataan kelompok penerima, hanya yang dekat pemerintah atau yang memiliki akses saja mendapat saluran pupuk subsidi dengan

mudah. Namun masih banyak petani yang tidak kebagian pupuk subsidi meski sangat membutuhkan.

Hamid menguraikan, berdasarkan data Selama 10 tahun terakhir, menunjukkan bahwa rata-rata perbandingan peningkatan jumlah subsidi pupuk tidak seiring dengan peningkatan produksi dan produktifitas.

Selengkapnya di fraksi.pks.id

Reses, Akmal Pasluddin Sosialisasikan UU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan

Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk memberikan informasi yang mutakhir dan pemahaman regulasi kepada pemangku kepentingan dan instansi mitra karantina di Sulsel.

Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P.,M.M.

Anggota Komisi IV DPR RI Dapil Sulsel I

Makassar (06/03) — Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan mulai disosialisasikan oleh Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar di Novotel, Kamis (5/3/2020).

Sosialisasi ini melibatkan sejumlah instansi terkait termasuk Balai Besar Karantina Pertanian Makassar Kementerian Pertanian. Para narasumber yang hadir antara lain Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin.

"Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 menggantikan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan sebagai dasar hukum penyelenggaraan karantina di

Indonesia yang sudah tidak mampu mengikuti perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat," ujar Akmal Pasluddin.

Selain itu juga, tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk memberikan informasi yang mutakhir dan pemahaman regulasi kepada pemangku kepentingan dan instansi mitra karantina di Sulsel.

Forum ini juga diharap menjadi momen konsultasi publik untuk menyelesaikan masalah dan tantangan karantina hewan dan ikan. Sebagai contoh, Disebutkan, dalam UU No. 16 Tahun 1992 peneanaan sanksi pidana berlaku sama untuk pelanggaran terhadap kegiatan pemasukan atau pengeluaran, yaitu 3 tahun dan denda 150.000.000

(seratus lima puluh juta), maka di dalam UU No. 21 tahun 2019 sanksi pidana dibedakan untuk pelanggaran ekspor, impor, atau antar area. Dalam hal peneanaan sanksi pidana, terdapat perbedaan antara beleid baru ini dengan aturan sebelumnya termasuk mengenai jumlah denda yang diberlakukan.

Legislator Fraksi PKS itu menjelaskan, Undang-undang ini telah digodok di DPR RI bersama pemerintah sejak tahun 2016 namun, baru rampung dan disahkan pada 18 Oktober 2019.

Menurut Akmal, UU No 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, ada upaya serius melindungi segala macam sumberdaya alam dan kesehatan manusia Indonesia dari penyebaran organisme pengganggu dan atau bahan makanan/pakan yang dapat menjadi media penyebaran jenis penyakit yang dapat merugikan kita semua.

"Fraksi kami di PKS berpendapat, bahwa UU Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan merupakan sebuah instrument hukum negara yang diarahkan sebagai dasar perlin-



dungan yang komprehensif terhadap upaya masuk dan menyebarkan organisme pengganggu, spesies asing invasif dan penyakit yang dapat mengancam kelestarian sumberdaya alam yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia", teras dia.

Politisi asal Sulawesi Selatan II ini menjelaskan, bahwa UU No 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan membangun sebuah sistem yang terpadu demi terwujudnya upaya perlindungan kedaulatan

Negara dalam bidang sumberdaya alam dan lingkungan. Undang-undang ini tidak saja berbicara tentang konsep sumberdaya hayati dan kesehatan manusia.

"Undang-undang ini memiliki dimensi yang jauh lebih luas berupa sebuah dimensi pertahanan dan keamanan terhadap bentuk kejahatan besar seperti pencurian sumberdaya genetik (biopiracy) dan ancaman yang menggunakan agen hayati sebagai sarannya (bioterrorism)", tutup Andi Akmal Pasluddin



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

H. Suryadi Jaya Purnama, S.T.
Anggota Komisi V DPR RI

Legislator PKS Minta Pemerintah Perketat Pemeriksaan di Pintu Masuk Internasional

Hal tersebut perlu dilakukan agar virus corona tidak mewabah di Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 5 ayat 1 UU No.6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, bahwa Pemerintah Pusat bertanggungjawab menyelenggarakan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk dan di Wilayah Indonesia secara terpadu

Legislator PKS Minta Pemerintah Perketat Pemeriksaan di Pintu Masuk Internasional

Terjadinya penularan dari warga negara asing ini sangat disayangkan, mengingat betapa lemahnya pengawasan yang dilakukan pemerintah di bandara-bandara yang merupakan pintu masuk ke Indonesia

H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T.

Anggota Komisi V DPR RI

Jakarta (03/03) — Anggota DPR RI Fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama merespon pengumuman Presiden Joko Widodo yang menyebut dua orang WNI terinfeksi virus Corona atau Covid-19.

Menurut pria yang disapa SJP ini, pengumuman Presiden seharusnya membuat pemerintah serius dalam mengawasi setiap pendatang dari Luar Negeri.

"Terjadinya penularan dari warga negara asing ini sangat disayangkan, mengingat betapa lemahnya pengawasan yang dilakukan pemerintah di bandara-bandara yang merupakan pintu masuk ke Indonesia", ungkap Suryadi.

Suryadi menyampaikan, seperti diketahui bahwa berdasarkan kondisi di Terminal

III Bandara Internasional Soekarno-Hatta, penumpang yang datang hanya diminta mengisi formulir kesehatan berwarna kuning yang berisi penilaian pribadi, bukan penilaian medis.

"Pemeriksaan suhu tubuh pun seperti dilakukan secara acak saja. Tidak semua penumpang dicek suhu tubuhnya", ujar Anggota Komisi V ini.

Hal ini kata SJP, sangat jauh dengan pemeriksaan Bandara di Milan, Italia. Seluruh penumpang di cek suhu tubuhnya.

"Di Milan, Italia semua penumpang yang datang diperiksa keningnya menggunakan termometer oleh petugas kesehatan dengan masker, sedangkan petugas

kesehatan lainnya berjaga-jaga di sekitarnya untuk melayani penumpang yang kedatangan dengan suhu tinggi. Bagi yang suhunya normal, dipersilakan lanjut ke bagian imigrasi untuk cap paspor," pungkasnya.

Berkenaan dengan itu, Suryadi Jaya Purnama (SJP) meminta kepada pemerintah agar lebih serius dan bekerja lebih keras dalam menjaga seluruh pintu masuk ke Indonesia baik Bandara, Pelabuhan maupun Pos Perbatasan.

"Hal tersebut perlu dilakukan agar virus corona tidak mewabah di Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 5 ayat 1 UU No.6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, bahwa Pemerintah Pusat bertanggungjawab menyelenggarakan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk dan di Wilayah Indonesia secara terpadu", tandasnya.

Selain itu Suryadi Jaya Purnama (SJP) juga mendorong dibentuknya Satgas Antivirus Corona, yang dapat disiagakan di seluruh pintu-pintu masuk tersebut.



Di Masa Reses, Rafli Tinjau Sejumlah Desa Alami Krisis Air

Kondisi ini perlu kita atasi sekarang juga, tahap pertama kita sudah berkoordinasi dengan Pemkab Aceh Besar agar menambah pasokan air, berikutnya PDAM diminta menghubungkan pipa hingga sampai ke masyarakat setempat. Pemerintah juga perlu meninjau DAS, dan mendata kebutuhan air

RAFLI

Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Aceh

Banda Aceh (07/03) — Permasalahan Air bersih yang di alami warga di Kabupaten Aceh Besar, tepatnya di Desa Lambaro Seubon dan Seubon Ayon mengundang perhatian anggota DPR RI asal Aceh Rafli, hingga melakukan kunjungan ke Desa setempat, pada Jumat (06/03/2020).

Warga yang mengeluhkan kesulitan air bersih untuk kebutuhan rumah tangga hingga menghambat aktivitas pertanian & perkebunan, Pasalnya keterbatasan tangki penyimpanan air juga menurut warga menjadi kendala

disamping memang setiap desa hanya mendapat pasokan air 2 tangki dalam seminggu, akibatnya mck ikut tidak terpenuhi.

Pada kesempatan kunjungan ke lokasi kekeringan tadi, Rafli menuturkan "Kondisi ini perlu kita atasi sekarang juga, tahap pertama kita sudah berkoordinasi dengan Pemkab Aceh Besar agar menambah pasokan air, berikutnya PDAM diminta menghubungkan pipa hingga sampai ke masyarakat setempat", pungkasnya.

Senada itu menurut Rafli, Pemerintah juga perlu meninjau Daerah Aliran Sungai (DAS)

dikawasan tersebut dan mendata kebutuhan air.

"Pemerintah juga perlu meninjau DAS, dan mendata kebutuhan air," lanjutnya.

Ia juga mengajak dan mengapresiasi Lembaga Pemerhati ikut mencari solusi atasi permasalahan ini

"Kita apresiasi teman - teman Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Solidaritas Perempuan Aceh, yang turut ikut membantu persoalan warga" Ujar Rafli Politisi Fraksi PKS.



DPR Minta Pemerintah Dorong BUMN Farmasi Sediakan Keperluan Antisipasi Corona

Negara kita memang sebaiknya lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap segala ancaman biologis ini. lebih baik mencegah, dari pada mengobati. Dari segi kerugian baik materil maupun imateril akan jauh lebih baik mencegah dari pada terlanjur kejadian

Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Komisi VI DPR RI

Jakarta (04/03) — Pasca kesibukan Kementerian BUMN membentuk BUMN Farmasi dimana PT. Bio Farma menjadi induk perusahaannya, Anggota DPR RI komisi VI, Nevi Zuairina meminta kementerian BUMN bersama BUMN Farmasi fokus menjamin ketersediaan stock produk pencegahan terhadap virus Corona. Sesuai tujuan awal, bahwa Adanya holding BUMN farmasi terdiri dari PT Kimia Farma Tbk (KAEF), PT Indofarma Tbk (INAF), dan PT Ppharos Tbk (PEHA) bertujuan memperkuat kemandirian industri dan meningkatkan ketersediaan produk.

"Dalam waktu dekat ini, masker N95 Kimia Farma

(KAEF) yang telah habis diborong BNPB bulan lalu, mesti segera tersedia kembali. Ketersediaan retail di seluruh penjuru toko di Indonesia mesti tersedia dengan mudah. Bila ini tidak segera dikondisikan, makan kedepannya akan ada yang memanfaatkan situasi di air keruh dengan permainan supply dan demand", ujar Nevi.

Legislator Sumatera Barat II ini mulai menemukan di berbagai wilayah, terutama daerah destinasi wisata, masker sudah mulai sulit ditemukan. Alasan yang selalu sama adalah, sudah barusan di borong orang. Ini kata Nevi, ibarat hukum rimba, yang punya sumber daya finansial berusaha

menyelamatkan kepentingan pribadi tanpa peduli kebutuhan orang lain.

Politisi PKS ini mengatakan, bahwa kemunculan pembentukan holding farmasi tahun 2020 ini, yang dilatarbelakangi oleh tren sektor kesehatan global di negara berkembang maupun negara maju, saat ini merupakan ajang pembuktian mampu memberikan kontribusi negara melindungi rakyatnya dari ancaman virus corona. Adanya holding farmasi ini diharapkan produk farmasi dapat tersebar secara merata ke seluruh pelosok negeri.

"Menteri BUMN melalui Surat Edaran Nokor SE-1/MBU/03/2020 Tentang Kewaspadaan terhadap Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kan sudah jelas regulasinya. Tapi yang paling penting adalah implementasi dan evaluasi dari surat edaran ini hari demi hari karena saat ini kita bukan berhadapan dengan masalah yang sepele. Negara kita saat ini sudah menjadi sorotan dunia berkaitan tentang keseriusan pada penanganan ancaman virus corona", tegas Nevi.



Nevi menjelaskan, hal penting yang perlu diperbuat kementerian BUMN untuk menunjang dan mendukung kegiatan pencegahan virus corona selain yang dilakukan oleh BUMN farmasi adalah masalah kepastian lancarnya distribusi logistik dan penyediaan energinya. Untuk itu ia meminta dengan tegas agar pemerintah melalui kementerian BUMN dapat memastikan Pengangkutan dan Logistik Darat, Laut dan Udara dapat terus siap siaga. Selain itu, BUMN Migas dan Energi yang dibutuhkan oleh

masyarakat, juga akan signifikan pada dukungan distribusi logistik pada armada pengangkutannya.

Legislator PKS ini menekankan, Negara kita harus mulai mampu menghadapi nilai buying dalam menghadapi wabah dunia atau apidemi. SOP adalah hal penting untuk diterapkan pada kasus atau keadaan apapun selayaknya seperti negara maju. Beberapa bulan lalu, beli masyarakatnya", tutup Nevi Zuairina.

Selengkapnya di fraksi.pks.id

DPR: Produk UMKM Harus Jadi Prioritas Keberpihakan Pemerintah

Saya minta Pak Jokowi menegaskan kembali kepada seluruh jajaran Kementerian dan Lembaga untuk memprioritaskan pembelian produk UMKM dalam belanja barang di setiap kementerian dan lembaga

AMIN AK, M.M.

Anggota Komisi VI DPR RI

Jakarta (07/03) — Wabah virus corona, yang berasal dari Cina, terus menginfeksi ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah dan sempat menyentuh Rp14.400 dan saat ini masih di angka Rp14.253 per dolar.

Dampak dari wabah virus corona akan memperlambat pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan hanya tumbuh dibawah 5%, jauh dibawah target yang ditetapkan Pemerintah sebesar 5,3%.

Salah satu sektor yang paling terdampak adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Meluasnya wabah virus corona meningkatkan kehilangan sejumlah besar potensi pendapatan UMKM.

Anggota Fraksi PKS DPR RI, Amin Ak mendesak

pemerintah agar memprioritaskan produk UMKM untuk pengadaan barang dan jasa yang diperlukan pemerintah. Dengan tetap memperhatikan kualitas, barang dan jasa yang bisa diproduksi UMKM harus menjadi prioritas dibanding produk impor.

“Saya minta Pak Jokowi menegaskan kembali kepada seluruh jajaran Kementerian dan Lembaga untuk memprioritaskan pembelian produk UMKM dalam belanja barang di masing-masing kementerian dan lembaga,” desak Amin.

Agar hal tersebut berjalan dengan baik maka produk UMKM harus dimasukkan dalam e-catalog yang dikelola oleh lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah (LKPP).

Dalam prosesnya, Amin meminta Kementerian Koperasi dan UKM untuk proaktif membantu UMKM menyiapkan tayangan produk mereka agar layak ditampilkan pada e-catalog.

Amin juga menagih komitmen Menteri BUMN yang akan berperan lebih aktif dalam pemberdayaan dan pengembangan UMKM. Caranya dengan membeli produk UMKM yang menyihkan keuntungan bagi pengembangan UMKM.

Selain itu Amin juga meminta LKPP agar menyiapkan produk UMKM untuk masuk dalam e-catalog dan memprioritaskan tayangan produk UMKM di e-catalog tersebut.

Amin juga meminta pemerintah memprioritaskan UMKM untuk mendapatkan alokasi dana kompensasi sebesar Rp10,8 triliun yang disediakan pemerintah. UMKM juga semestinya bisa menerima insentif berupa keringanan pajak, penundaan pembayaran kredit dan penyediaan modal murah.

Menurut Amin, UMKM bisa diandalkan menjadi tulang punggung bahkan penyelamat ekonomi nasional ditengah



kelesuan ekonomi global akibat terdampak virus corona. Selain menjadi penggerak ekonomi domestik UMKM juga menampung jutaan tenaga kerja sehingga wajar jika mendapat prioritas penyelamatan oleh pemerintah dari dampak wabah Covid-19.

Amin menyampaikan UMKM, khususnya usaha mikro adalah bagian dari kegiatan ekonomi sehari-hari masyarakat yang berjalan untuk menunjang

kehidupannya. Usaha mikro ini mendominasi skala usaha di Indonesia yang jumlahnya mencapai 63 juta unit, sedangkan usaha kecil mencapai 783 ribu unit.

“Jika pemerintah mampu menjaga pertumbuhan usaha UMKM ditengah kelesuan ekonomi saat ini dan maka target pertumbuhan ekonomi pemerintah sebesar 5,3% bisa tercapai,” pungkasnya.

Foto : dpr.go.id

HTERA
RAKYAT
ONESIA



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

A.H. Mu'arif Amin
Menteri Presiden Republik Indonesia

ksdpri
pksdpri
PKS DPR RI
id

PKS DPR-RI
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
PKS

KH. Bukhori, Lc., M.A.
Anggota Komisi VIII DPR RI

Penyetopan Umrah Sepihak, Bukhori : Pemerintah Saudi Tak Boleh Abaikan Hak Jamaah

"Saya sangat menyesalkan tindakan pemerintah Arab Saudi yang melakukan penghentian secara sepihak. Pemerintah Arab Saudi tidak boleh mengabaikan hak-hak jamaah. Mereka (red; Pemerintah Arab Saudi) harus bertanggung jawab untuk kerugian materil maupun non materil yang ditimbulkan akibat keputusan sepihak tersebut"

Penyetopan Umrah Sepihak

Bukhori: Pemerintah Saudi Tak Boleh Abaikan Hak Jamaah!

“Saya sangat menyesalkan tindakan pemerintah Arab Saudi yang melakukan penghentian secara sepihak. Pemerintah Arab Saudi tidak boleh mengabaikan hak-hak jamaah. Mereka (red; Pemerintah Arab Saudi) harus bertanggung jawab untuk kerugian materil maupun non materil yang ditimbulkan akibat keputusan sepihak tersebut

KH. BUKHORI, Lc., M.A

Anggota Komisi VIII DPR RI

Jakarta (29/02) — Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf geram dan merasa prihatin terhadap tindakan pemerintah Arab Saudi yang menghentikan secara sepihak pelayanan umrah bagi sejumlah negara di dunia, termasuk Indonesia.

Bukhori menyayangkan kebijakan yang terkesan mendadak tersebut sehingga membuat jamaah umrah asal Indonesia terlantar di sejumlah bandara di Indonesia.

“Saya sangat menyesalkan

tindakan pemerintah Arab Saudi yang melakukan penghentian secara sepihak. Pemerintah Arab Saudi tidak boleh mengabaikan hak-hak jamaah. Mereka (red; Pemerintah Arab Saudi) harus bertanggung jawab untuk kerugian materil maupun non materil yang ditimbulkan akibat keputusan sepihak tersebut.” ujar Bukhori saat ditemui di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI, Senayan, Jumat (28/02/2020).

Bukhori mengingatkan agar pemerintah Arab Saudi

memberikan perhatian yang serius terhadap pemenuhan hak-hak jamaah umrah kendati adanya keputusan penyetopan sepihak.

Ia menambahkan, hal-hal yang dapat dihitung secara materil harus dipertanggungjawabkan secara optimal oleh pemerintah Arab Saudi, khususnya bagi para jamaah umrah asal Indonesia yang telah tiba di Madinah atau Jeddah.

Bukhori juga mendorong pemerintah Indonesia untuk segera menjelaskan informasi yang valid dan transparan kepada pemerintah Arab Saudi tentang isu penyebaran virus corona di Indonesia.

“Jika melihat fenomena global saat ini, kebijakan penghentian sementara oleh pemerintah Arab Saudi sebenarnya dapat dimengerti sepanjang dalam koridor yang masuk akal dan bertanggung jawab. Oleh karena itu menjadi tugas penting bagi pemerintah Indonesia untuk menjelaskan kondisi riil di Indonesia terkait isu penyebaran virus corona.” pungkas politisi PKS ini.



HNW Desak Pemerintah Lakukan Protes Kepada India Terkait Warga Muslim

Sebagai anggota Dewan HAM PBB, dan Negara demokrasi yg menolak radikalisme,intoleran dst, seharusnya minimal pemerintah RI lakukan protes keras ke pemerintah India. Agar radikalisme terkoreksi, agar keadilan&harmoni tegak

Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A

Wakil Ketua MPR RI

Jakarta (01/02) — Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mendesak kepada pemerintah RI untuk segera melayangkan protes keras kepada pemerintah India yang tak bisa melindungi warga muslim mereka.

Desakan Hidayat Nur Wahid tersebut disampaikan melalui media sosial Twitter @hnurwahid, Jumat, 28 Februari 2020.

"Sebagai anggota Dewan HAM PBB, dan Negara

demokrasi yg menolak radikalisme,intoleran dst, seharusnya minimal pemerintah RI lakukan protes keras ke pemerintah India. Agar radikalisme terkoreksi, agar keadilan&harmoni tegak," pintanya.

Pembantaian terhadap umat muslim dipicu oleh protes menentang Undang-Undang Kewarganegaraan (CAA).

UU tersebut mengizinkan India untuk memberi status kewarganegaraan terhadap

imigran yang menerima persekusi di negara lain.

Negara itu seperti Bangladesh, Pakistan, dan Afghanistan. Namun tidak bagi warga muslim.



Viral Ortu Santri Hardik Pimpinan Ponpes

Aleg PKS Prihatin dan Kawal Revisi UU Guru dan Dosen

Sangat disayangkan, kenapa kejadian seperti ini terus berulang? Bila ada sesuatu yang terjadi, wali santri harusnya berkomunikasi dan mengklarifikasi dengan tetap menjaga adab dan wibawa Guru

H. NURHASAN ZAIDI, S.Sos.I

Anggota Komisi VIII DPR RI

Jakarta (07/03) — Anggota Komisi VIII DPR RI FPKS, Nurhasan Zaidi, mengungkapkan keprihatinannya atas sikap kasar orang tua santri kepada pimpinan pesantren di Riau dalam video yang viral di masyarakat.

"Sangat disayangkan, kenapa kejadian seperti ini terus berulang? Bila ada sesuatu yang terjadi, wali santri harusnya berkomunikasi dan mengklarifikasi dengan tetap menjaga adab dan wibawa Guru", ungkap Nurhasan di Jakarta, Kamis (05/03/2020).

Politisi PKS yang juga pimpinan salah satu Ormas Islam menjelaskan bahwa Lembaga Pendidikan khususnya

pesantren punya sistem dan aturan dalam proses pendidikan santrinya, wali santri seharusnya menghormatinya sebagai bagian dari kesediannya menitipkan anaknya ke lembaga tersebut.

"Untuk itu kita minta pemerintah dalam hal ini kanwil Kemenag hadir untuk mengislahkan mereka, klarifikasi masalahnya dan carikan solusi, disinilah fungsi program dan anggaran pembinaan kepada lembaga pendidikan keagamaan", ujarnya.

Nurhasan melanjutkan bahwa orang tua santri dalam video yang viral tersebut juga selayaknya meminta maaf

kepada pihak pesantren dan masyarakat secara terbuka.

"Sudah terlanjur viral, tak bisa dibayangkan bila hal ini dibiarkan tanpa ada permintaan maaf secara resmi dir yang bersangkutan. Jelas akan menimbulkan efek yang negatif bagi kewibawaan Guru dan lembaga pendidikan di mata masyarakat. Apalagi konon yang bersangkutan ASN, ini bahaya bagi pembentukan karakter bangsa", tegasnya.

Menurut Anggota Komisi VIII, peristiwa ortu menghardik pimpinan ponpes menggugah kita bahwa ada yang harus diperbaiki dalam sistem pendidikan kita. Untuk itu, kita akan dorong terus Komisi terkait agar revisi atas UU Guru dan Dosen yg telah masuk dalam Prolegnas prioritas tahun ini agar segera dibahas dan dirampungkan.

"Kita akan kawal agar para pendidik di semua lembaga pendidikan termasuk pendidikan keagamaan dapat terlindungi kewibawaannya supaya masalah serupa tidak lagi terulang", pungkasnya





FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

*Selamat &
Sukses*



Washatiyah Islam dan
Re-Engineering Organisasi
Menuju Indonesia Maju

Komisi IX Dukung Pengembangan BLK Kota Padang

Saya dan tim berkunjung ke BLK Kota Padang melihat beberapa pelatihan-pelatihan yang ada di sini, ada pelatihan pengoperasian mesin bubut, pelatihan garmen apparel serta pelatihan lainnya

H. ANSORY SIREGAR, Lc,

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar berharap Balai Pelatihan Kerja (BLK) Kota Padang dapat menjadi pilot project bagi masyarakat yang membutuhkan keahlian kerja pada bidang kerja yang diinginkan. Ke depannya, Komisi IX DPR RI akan mendukung agar BLK Kota Padang bisa dikembangkan lebih baik lagi.

“Saya dan tim berkunjung ke BLK Kota Padang melihat beberapa pelatihan-pelatihan yang ada di sini, ada pelatihan pengoperasian mesin bubut, pelatihan garmen apparel serta pelatihan lainnya,” katanya usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI meninjau BLK Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat (28/2/2020).

Ansory mengusulkan agar program-program pelatihan keahlian yang ada di BLK Kota Padang lebih ditingkatkan lagi, menyesuaikan dengan bidang kebutuhan dan kepentingan masyarakat. “Kalau berbicara masalah anggaran, kami akan tambah,” imbuh politisi Fraksi PKS itu.

Pendapat yang sama disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Ratu Ngadu Bonu Wulla. Ia mengapresiasi kinerja BLK Kota Padang dan menilai apa yang sudah dilakukan sangat luar biasa. “Melihat begitu tingginya komitmen mereka untuk mendorong program kerja. Saya sempat bertemu dan berbicara dengan salah satu mitra mereka yang menerima hasil output dari tenaga kerja BLK. Ini hal yang

luar biasa,” puji Ratu Ngadu. Berdasarkan pemaparan tadi, lanjut Ratu Ngadu, BLK Kota Padang sudah menjalin kerja sama dengan beberapa stakeholder diantaranya BPN, BNN, Pemerintah Desa, Kejaksaan, Perguruan Tinggi, Dinas Sosial Kota Padang, industri usaha dan lainnya. Terobosan seperti ini menurutnya penting dilakukan dalam rangka menekan angka pengangguran dengan upgrading skill dari pengembangan kerja sama antara BLK Kota Padang dengan stakeholder.

“Dengan kerja sama dengan stakeholder yang sudah dilakukan BLK Kota Padang, saya rasa bisa mengantisipasi pengangguran agar tidak bertambah lagi. Jika memerlukan penambahan anggaran, tinggal diajukan sesuai prosedur yang semestinya,” kata politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Kemudian, untuk menuju pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, diharapkan pihak pemerintah daerah maupun pemerintah pusat fokus bisa mengembangkan BLK-BLK yang



ada. Mengingat fungsi BLK adalah untuk melaksanakan pelatihan pemberdayaan dan uji kompetensi tenaga kerja, melakukan pelatihan kerja dan pelayanan konsultasi pemberdayaan dan kerja sama kelembagaan pelatihan.

Di Indonesia sendiri terdapat 305 BLK, adapun

sejumlah pelatihan yang ada di BLK meliputi kejuruan bisnis manajemen, kejuruan elektronika, kejuruan listrik, kejuruan otomotif, kejuruan manufaktur, kejuruan refrigeration, kejuruan bangunan, kejuruan garmen apparel, dan kejuruan lainnya. (rni/es/sf)

Cek Kesiapan Penanganan Virus Corona, Alifudin Temui Kepala RSUD Kota Pontianak

Alat di RSUD kota Pontianak sangat terbatas, seperti alat pelindung diri hanya tersedia 10 set, alat bekas penanganan flu burung sudah dari tahun 2007 dan kondisinya sudah pada berkarat semua, perawat yang terlatih dalam penanganan flu burung juga sudah banyak yang pensiun, insya Allah kita akan sampaikan ke kementerian terkait kondisi ini, dan semoga ada tindak lanjut dari pak menteri

H. ALIFUDDIN, S.E.,M.M.

Anggota Komisi IX DPR RI

Pontianak (06/03) — Virus corona yang beberapa waktu lalu diketahui telah memasuki Indonesia, tepatnya di Kota Depok menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat yang selama ini virus tersebut telah menjangkiti negara lain.

Alifudin Anggota DPR RI komisi IX asal Kalbar yang ditemui saat melakukan Kunjungan Lapangan Komisi IX terkait kesiapan RSUD di Kalbar menghadapi Covid-19, Kamis (5/3/2020) di RSUD Kota Pontianak Sultan Syarif

Muhamad Al Kadrie, mengatakan kunjungan lapangan kali ini sangat spesial, karena terkait kesiapan dan kesiapan Rumah Sakit menghadapi dampak virus corona.

"Alhamdulillah bisa langsung mengecek kesiapan dari RSUD Kota Pontianak terkait virus Corona ini, dan insya Allah Kota Pontianak siap bila ada warga yang terkena," Ujarnya.

Alifudin juga memastikan terkait peralatan yang tersedia

di RSUD kota Pontianak.

"Tadi juga disampaikan oleh pak Johnson, alat di RSUD kota Pontianak sangat terbatas, seperti alat pelindung diri hanya tersedia 10 set, alat bekas penanganan flu burung sudah dari tahun 2007 dan kondisinya sudah pada berkarat semua, perawat yang terlatih dalam penanganan flu burung juga sudah banyak yang pensiun, insya Allah kita akan sampaikan ke kementerian terkait kondisi ini, dan semoga ada tindak lanjut dari pak menteri," ujarnya.

Dalam kunjungan ke RSUD kota Pontianak Alifudin langsung bertemu dengan Dokter Johnson Kepala RSUD Kota Pontianak dan Sidiq Handanu Kadis Kesehatan Kota Pontianak.

Dokter Johnson berharap dengan adanya kunjungan kerja dari Pak Alifudin, ada bantuan dari kementerian terkait peralatan yang sudah tidak layak lagi.



Pemerintah Harus Cepat Antisipasi Kondisi Terberat Virus Corona

Lakukan penanganan pasien, RS, tim medis dan semua yg pernah kontak dengan pasien, sesuai SOP WHO. Menginformasikan secara berkala update tentang perkembangan 2 pasien dan subyek kontaknya secara transparan

Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.

Anggota Komisi IX DPR RI

Jakarta (02/03) — Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah bergerak cepat mengantisipasi kemungkinan terberat akibat virus corona di Indonesia. Termasuk dalam hal ini, dampak ekonomi dan ketersediaan bahan pokok pangan.

Menurut Mufida, Indonesia harus belajar dari negara tetangga yang berhasil mencegah dampak buruk virus ini. Jangan meremehkan situasi yang ada di Indonesia.

"Pemerintah juga harus menindak tegas pihak-pihak yang mencari untung di tengah kecamasan atas meluasnya wabah virus corona. Pihak-pihak tersebut antara lain, spekulasi yang menimbun masker dan

hand sanitizer serta menjualnya kembali dengan harga gila-gilaan", tegas Mufida dalam siaran persnya, Senin (02/03/2020).

Mufida pun menyeroti melonjaknya harga masker dan hand sanitizer di pasaran pasca Presiden Joko Widodo mengumumkan 2 WNI positif terinfeksi virus corona (Covid-19).

"Musibah ini, mari kita hadapi bersama-sama. Sebagaimana jiwa gotong royong bangsa Indonesia. Jangan ada yang mengambil untung dari derita sesama," tegas politisi PKS ini.

Sebagaimana ramai diberitakan masker dan hand sanitizer jadi barang yang paling diburu masyarakat belakangan ini. Bahkan, stoknya di pasaran

mulai menipis. Harga jual pun melonjak drastis hingga puluhan kali lipat dari biasanya.

Di Pasar Pramuka, Jakarta Pusat misalnya, harga per box masker, kemarin masih 50 ribu rupiah. Itupun sudah lebih tinggi dibanding harga sebelum ramai isu COVID-19. Namun, hari ini harganya sudah melonjak jadi 350 ribu rupiah per box.

"Bahkan, sampai ada yang mengambil keuntungan dengan membuat masker palsu yang tidak terjamin kebersihan dan keamanannya bagi kesehatan pengguna," tandas Mufida.

Mufida menyatakan turut prihatin atas masuknya Indonesia menjadi negara positif Covid-19. Dugaan negara-negara lain dan peneliti Harvard akhirnya terbukti hari ini.

"Semoga ini menjadi pelajaran bagi pemerintah," ujarnya.

Untuk itu, Mufida meminta pemerintah melakukan langkah cepat terkait 2 pasien positif virus corona itu. Pertama, lakukan tracking terhadap pihak kedua yang pernah berinteraksi langsung dengan kedua pasien ini.

"Juga tracking pihak ketiga yang pernah berinteraksi



dengan pihak kedua dan seterusnya," tuturnya.

Tak kalah penting, Mufida menekankan agar ada penanganan serius terhadap 2 pasien positif virus corona ini untuk bisa disembuhkan

"Lakukan penanganan pasien, RS, tim medis dan semua yg pernah kontak dengan pasien, sesuai SOP WHO. Menginformasikan secara berkala update tentang perkembangan 2 pasien dan subyek kontaknya secara transparan," tambahnya.

Sementara terhadap masyarakat luas, pemerintah

diminta mencegah kepanikan dengan kegiatan layanan kesehatan seperti pemeriksaan deteksi dini Covid 19 secara gratis di semua puskesmas bagi masyarakat yang merasakan adanya gejala awal Covid 19.

"Hendaknya pemerintah menyiapkan langkah taktis yang konkret secara serius untuk menangani pasien-pasien suspect dan positif covid-19 sesuai SOP WHO," tegas Mufida.

Selengkapnya di fraksi.pks.id

RSUP Dr. M. Djamil Padang Perlu Penambahan Ruang Bertekanan Negatif

Ruangan bertekanan negatif di rumah sakit ini masih berjumlah 6 ruangan, 12 tempat tidur saya rasa dengan jumlah sekarang masih sangat kurang bila bicara dari jumlah pasien yang dilayani. Pasalnya jumlah pasien tiap harinya mungkin bertambah

Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si.

Anggota Komisi IX DPR RI

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani mendukung pengembangan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. M. Djamil, Padang, sebagai rumah sakit rujukan di Sumatera Barat dan juga di Sumatera bagian tengah. Dengan adanya pengembangan diharapkan semua jenis layanannya bisa dilakukan. Menurutnya, salah satu hal yang harus dikembangkan adalah penambahan ruangan yang bertekanan negatif.

Ruangan tersebut diperuntukkan kepada pasien dengan penyakit seperti TBC,

TB MDR (Multi Drug Resistance) ataupun kasus pasien yang putus minum obat. "Ruang bertekanan negatif di rumah sakit ini masih berjumlah 6 ruangan, 12 tempat tidur saya rasa dengan jumlah sekarang masih sangat kurang bila bicara dari jumlah pasien yang dilayani. Pasalnya jumlah pasien tiap harinya mungkin bertambah," kata Netty usai mengikuti pertemuan Tim Kunker Reses Komisi IX DPR RI dengan direksi RSUP Dr. M. Djamil, Padang, Jumat (28/2/2020).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berharap,

Komisi IX DPR RI dapat memperjuangkan pengembangan RSUP Dr. M. Djamil sehingga dapat maksimal memenuhi pelayanan kesehatan. "Mudah-mudahan dengan kedatangan Komisi IX DPR RI didampingi jajaran Eselon I Kementerian Kesehatan ini menjadi satu masukan yang bisa diperjuangkan dalam memenuhi pelayanan kesehatan yang lebih baik," harap Netty.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama RSUP Dr. M. Djamil, Dr Yusirwan berharap kedatangan Komisi IX DPR RI bisa memfasilitasi agar lahan milik PT. KAI yang berada di belakang kawasan RSUP Dr. M. Djamil bisa dimiliki dan didatangkan. "Saat ini kita sewa. Besar harapan kami kepada Komisi IX DPR RI bisa memperjuangkan lahan tersebut bisa dimiliki rumah sakit. Nantinya bisa di gunakan untuk pengembangan perluasan rumah sakit untuk menata pasien-pasien lebih baik lagi," harap Yusirwan. (rri/sf)





HARI PEREMPUAN INTERNASIONAL
8 Maret 2020

Partisipasi dan Kontribusi Perempuan Negara Jaya Bangsa Sejahtera

Hj. Ledia Hanifa A, S.Si., M.Psi.T
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI



Selamatkan Cagar Budaya di Aceh

Sejarah Aceh tampak dari benda cagar budaya. Sejak dulu Aceh menginspirasi Indonesia bahkan dunia. Karena itu, kami meminta Pemerintah Aceh menyelamatkan cagar budaya yang merupakan jejak sejarah

Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T |

Anggota Komisi X DPR RI

Banda Aceh (**Antara**) - Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS Ledia Hanifa meminta Pemerintah Aceh menyelamatkan cagar budaya yang ada di provinsi ujung barat Indonesia tersebut.

"Sejarah Aceh tampak dari benda cagar budaya. Sejak dulu Aceh menginspirasi Indonesia bahkan dunia. Karena itu, kami meminta Pemerintah Aceh menyelamatkan cagar budaya yang merupakan jejak sejarah," kata Ledia Hanifa di Banda Aceh, Senin.

Ledia Hanifa menyebutkan dirinya berkunjung ke Aceh dan menyempatkan diri mengunjungi beberapa situs cagar budaya di Aceh, termasuk situs sejarah makam Sultan Jamalulail yang ada di sebelah selatan masjid Raya

Baiturrahman yang rusak parah.

Menurut Ledia Hanifa, kondisi makam para sultan dan beberapa cagar budaya lainnya dalam keadaan darurat tersebut harus segera diselamatkan karena jejak sejarah Aceh ini bisa hilang dan dilupakan generasi mendatang.

Padahal, sebut Ledia Hanifa, undang-undang memerintahkan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota menyediakan anggaran cadangan bila sewaktu-waktu ditemukan benda cagar budaya baru.

"Jika generasi sekarang kehilangan sejarah, maka juga kehilangan masa depan. Aceh kaya dengan peninggalan sejarah dan budaya yang

menunjukkan cikal bakal kebesaran bangsa Indonesia," kata Ledia Hanifa.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera tersebut mengeluhkan kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap hal itu. Cagar budaya merupakan kekayaan negara yang semestinya jadi perhatian bersama dan jangan disia-siakan.

"Kami mengapresiasi perjuangan teman-teman di Aceh yang sedang menjaga, mencari dan melestarikan benda cagar budaya. Kami mengajak pemerintah daerah tidak membiarkan mereka bekerja sendiri. Konstitusi memeriksakan pemerintah daerah ikut terlibat menyelamatkan cagar budaya," kata Ledia Hanifa



Fikri Faqih: Omnibus Law Hanya Pro Pengajar Asing

“Guru dan dosen lokal wajib sertifikasi, sedangkan pengajar asing dikasih karpet merah, ini benar benar RUU alien

Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih mengancam pasal-pasal dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang diskriminatif terhadap guru dan dosen dalam negeri, dan sebaliknya sangat memihak kepada pengajar asing. “Guru dan dosen lokal wajib sertifikasi, sedangkan pengajar asing dikasih karpet merah, ini benar benar RUU alien,” kata dia di Jakarta, Sabtu (29/2).

Setelah beboh berbagai pasal ‘alien’ yang ditemukan dalam Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, kini publik dikagetkan dengan pasal dalam RUU usulan pemerintah itu yang mengatut tentang sertifikasi guru dan dosen, dimana guru dan dosen asing tak wajib disertifikasi. “kenapa harus diskriminatif terhadap pengajar lokal, apa jaminan bahwa

pengajar asing itu lebih baik?,” tanya Fikri. Dia mengutip beberapa pasal yang Sebelumnya ada di Undang Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, dan kini direvisi dalam RUU baru tersebut.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu juga mempertanyakan kenapa RUU baru tersebut menghapus prioritas bagi dosen lokal yang mengajar di kampus asing yang beroperasi di Indonesia. Dalam Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, disebutkan kewajiban bahwa dosen lokal wajib diprioritaskan sebagai pengajar di kampus asing. “Tapi pasal ini dihapus oleh Omnibus Law, jadi nanti supaya yang ngajar alien semua,” ucap dia.

Omnibus Law juga diketahui menghapus

ketentuan ketentuan yang mengatur pidana bagi pelaku dan pemberi ijazah palsu. “Kini semakin lengkap, bahwa pengajar asing itu yang bisa jadi ga jelas kualifikasinya, asal dia bule mungkin dengan bekal ijazah jadi-jadian, maka boleh mengajar di sini,” sindir Fikri.

Maka jangan heran, lanjut Fikri, “RUU ini memang memberi keleluasaan lebih bagi alien untuk menginvasi bumi Indonesia,” cetus dia.

ebelumnya, Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja sudah diserahkan pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 12 Februari lalu. Pada Pasal 70 RUU tersebut, merevisi sejumlah pasal di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Salah satunya pada Pasal 8 UU Guru dan Dosen, hanya diatur kewajiban bagi guru untuk memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Namun dalam RUU baru,



tepatnya pada halaman 498 draf RUU Omnibus Law, Pasal 8 jadi memiliki 2 ayat. Ayat tambahan tersebut berbunyi, “Sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib dimiliki oleh guru yang berasal dari lulusan perguruan tinggi lembaga negara lain yang terakreditasi.”

Dengan demikian, guru sekolah dalam negeri wajib memiliki sertifikasi pendidik. Sementara guru dari negara lain yang mengajar di Indonesia tak wajib memiliki sertifikasi pendidik jika lulus dari perguruan tinggi terakreditasi di luar negeri.

Ketentuan serupa juga diterapkan untuk dosen dari

negara lain yang ingin mengajar di Indonesia. Pada UU No 14 tahun 2005, Pasal 45 hanya mengandung satu ketentuan, yaitu dosen wajib memiliki sertifikasi pendidik, kompetensi, kualifikasi akademik, sehat jasmani dan rohani.

Dalam draf RUU Omnibus Law, tepatnya pada halaman 499, Pasal 45 jadi memiliki dua ayat. Ayat pertama mengatur kewajiban dosen memiliki sertifikasi pendidik dan lain-lain. Kemudian ayat kedua mengatur pengecualian syarat kepemilikan sertifikasi pendidik bagi dosen asing yang ingin mengajar di Indonesia.

Selengkapnya di fraksi.pks.id

Saat Reses Sakinah Terpanggil Perjuangkan IAIN Palu Menjadi UIN

“Tuntutan dalam bidang perkembangan ilmu pengetahuan saat ini, serta di sisi lain kebutuhan masyarakat terhadap lembaga pendidikan yang berkualitas, akan mampu dijawab oleh segenap sivitas akademika di IAIN Palu. Dan salah satu itu, bisa diwujudkan bila IAIN Palu bisa meningkat statusnya menjadi UIN

Hj. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag.

Anggota Komisi X DPR RI Dapil Sulteng

Palu (06/03) — Anggota DPR-RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F PKS), Sakinah Aljufri, mengaku merasa terpanggil untuk memperjuangkan alih status IAIN Palu menjadi Universitas Islam Negeri (UIN).

“Sebagaimana telah kami sampaikan ke teman-teman media sebelum ini, bahwa secara kelembagaan IAIN Palu berada di bawah naungan Kementerian Agama yang merupakan mitra komisi VIII,

sedangkan saya di komisi X. Tetapi komisi saya terkait dengan masalah pendidikan, sehingga secara tidak langsung, saya juga bisa untuk ikut memperjuangkan peningkatan status IAIN Palu ini,” katanya.

Selain itu, perjuangan yang dilakukan Sakinah dalam mendukung peningkatan status IAIN, agar kualitas pendidikan di Tanah Sulawesi Tengah bisa meningkat. Menjadi UIN, maka tentu saja akan berimplikasi pada peningkatan mutu dan

layanan, serta kesempatan bagi putra-putri Sulawesi Tengah dalam menuntut ilmu di satu-satunya Perguruan Tinggi Negeri Islam di Sulawesi Tengah tersebut.

Jika nantinya IAIN Palu benar-benar bisa meningkat statusnya menjadi UIN, maka akan membuka fakultas umum. Hal itu kata Sakinah yang juga merupakan tokoh pendidik di lingkungan amal usaha Alkhairaat ini, akan menjadi kunci bagi generasi muda Sulawesi Tengah, dalam menjawab tantangan masa kini dan mendatang.

“Tuntutan dalam bidang perkembangan ilmu pengetahuan saat ini, serta di sisi lain kebutuhan masyarakat terhadap lembaga pendidikan yang berkualitas, akan mampu dijawab oleh segenap sivitas akademika di IAIN Palu. Dan salah satu itu, bisa diwujudkan bila IAIN Palu bisa meningkat statusnya menjadi UIN. Ini merupakan salah satu misi perjuangan kami, dalam peningkatan kualitas



pendidikan di Sulawesi Tengah, yang mencakup 13 Kabupaten dan Kota, yang sudah barang tentu, setiap tahunnya mengirimkan ribuan putra-putri terbaiknya, untuk menempuh pendidikan di IAIN Palu dan insya Allah bisa menjadi UIN,” tandas Sakinah.

Di sisi lain, Sakinah juga akan menjanjikan siap untuk mengalokasikan bantuan dalam bentuk beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) bagi mahasiswa IAIN Palu. Namun beasiswa tersebut, baru akan teralokasi pada 2021 mendatang.

“Sal jumlahnya berapa, kami belum bisa tentukan. Tapi insya Allah, di 2021 nanti, kami berupaya ada mahasiswa IAIN Palu menerima bantuan beasiswa dari kami,” tandasnya.

Selain ke IAIN, Sakinah juga bersilaturahmi dengan pimpinan Universitas Alkhairaat Palu. Seperti halnya di IAIN, di depan rektor Unisa Palu, Dr. Umar Alatas, Spi, MPSI, Hj Sakinah juga berjanji untuk mengalokasikan bantuan beasiswa bagi mahasiswa di Unisa Palu.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag., M.Si.

Anggota Komisi XI DPR RI

Kunjungi Jogja
**DPR Pertanyakan
Metodologi Peng-
ambilan Data BPS
Penduduk Miskin**

“Angka 11,48 persen jumlah penduduk miskin di Jogjakar-ta yang disodorkan BPS diambil berdasarkan sampling. Artinya tidak diketahui secara pasti, berapa jumlah pendu-duk miskin di Jogjakarta, apalagi jika didasarkan pada nama dan alamat. Angka kemiskinan di DIY ini mestinya bisa di potret dengan lebih jelas. Kejelasan data menjadi penting, karena akan mengarahkan program apa yang tepat untuk mengentaskan kemiskinan di daerah itu. Sehingga problem kemiskinan di Jogjakarta bisa diupayakan solusinya yang tepat”

Kunker Ke Jogja,

DPR Pertanyakan Metodologi Pengambilan Data BPS Penduduk Miskin

Target pemerintah bukan hanya bagaimana angka kemiskinan nasional turun di satu digit, akan tetapi bagaimana penduduk miskin dapat benar-benar dibantu untuk meningkatkan tingkat kesejahteraannya

Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si.

Anggota Komisi XI DPR RI

Yogyakarta (01/03) — Dalam kunjungan kerja spesifik komisi XI DPR RI ke Yogyakarta Jumat, (28/02/2020), Anis Byarwati anggota dewan dari Fraksi PKS menyortir masalah kemiskinan di Yogyakarta, yang masih tinggi terutama dua kabupaten yaitu Kulon Progo dan Gunung Kidul sebagaimana disampaikan oleh kepala Bappeda DIY Budi Wibowo.

Pada data yang disampaikan Budi Yuwono disebutkan bahwa faktor penyebab tingginya kemiskinan di kedua kabupaten tersebut per 10 Juli 2011 adalah karena faktor "exclusion error" yaitu kesalahan yang terjadi karena orang yang seharusnya menjadi sasaran program pengentasan

kemiskinan namun kenyataannya malah tidak menerima.

Masalah ini terjadi, karena ketidaksesuaian data dalam pendataan warga miskin. Selain itu kondisi masyarakat yang berubah, yakni sebelumnya miskin menjadi tidak miskin atau sebaliknya. Persoalan lain yang terjadi karena tidak maksimalnya proses verifikasi dan validasi (verivali).

"Kedepan harus dilakukan proses verivali sesuai aturan yang berlaku agar exclusion error tidak terjadi," usul Anis.

Selain itu, Anis juga menyortir metode yang dipakai BPS dalam memetakan kemiskinan. "Metode yang dipakai BPS ini metode

sampling, yang disebutkan bukan populasi. Sehingga kita tidak tahu berapa tepatnya jumlah penduduk miskin di Yogyakarta," katanya menambahkan.

Anis menjelaskan angka 11,48 persen jumlah penduduk miskin di Yogyakarta yang disodorkan BPS diambil berdasarkan sampling. Artinya tidak diketahui secara pasti berapa jumlah penduduk miskin di Jogjakarta, apalagi jika didasarkan pada nama dan alamat.

"Jadi jika diurai berapa jumlah penduduk miskin di Kulonprogo, siapa saja mereka dan rumahnya dimana, dapat dipastikan tidak akan bisa diketahui", tegasnya.

Anis mendorong BPS agar dapat melakukan pemetaan berdasarkan populasi mengingat wilayah Yogyakarta tidak terlalu luas dengan jumlah penduduk yang tidak terlalu banyak. Apalagi sudah diketahui bahwa daerah tertinggal kemiskinan adalah Kulonprogo dan Gunung Kidul.

"Angka kemiskinan itu mestinya bisa di potret dengan



lebih jelas" tegasnya.

Kejelasan data, jelas Anis, menjadi penting karena ia akan mengarahkan program apa yang tepat untuk mengentaskan kemiskinan di daerah itu. Sehingga angka kemiskinan di Jogjakarta diperbaiki.

Legislator kelahiran Jawa Timur ini juga menyatakan bahwa mengentaskan

kemiskinan bukan hanya persoalan statistik.

"Target pemerintah bukan hanya bagaimana angka kemiskinan nasional turun di satu digit, akan tetapi bagaimana penduduk miskin dapat benar-benar dibantu untuk meningkatkan tingkat kesejahteraannya", pungkasnya.

Pemerintah Harus Dengar, RUU Omnibus Law Ditolak Rakyat

RUU ini berpotensi mengundang masuknya investasi tidak prioritas, kurang berkualitas, dan tidak mensejahterakan. Isi RUU ini saja kurang fokus pada industri prioritas yang tinggi penyerapan pekerja,"

H. HIDAYATULLAH, S.E.

Anggota Komisi XI DPR RI

Sumatera Utara (4/2) - Penolakan Lembaga Independen Negara, Serikat Buruh, Akademisi dan LSM atas Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja semakin kencang. Ditambah dengan demo Mahasiswa hari ini di gerbang depan Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. (4/3/2020).

Hidayatullah anggota komisi XI DPR RI mengatakan "Pemerintah harus dengar aspirasi rakyat, buruh, jurnalis hingga semua kalangan yang terdampak didalamnya, RUU ini ditolak rakyat" Menurut Hidayatullah, jika aspirasi rakyat diabaikan maka Pemerintah

mengabaikan konsep pembentukan Undang undang yang baik. Dimana harus melibatkan masyarakat luas dalam perumusan atau penyusunannya.

"RUU ini berpotensi mengundang masuknya investasi tidak prioritas, kurang berkualitas, dan tidak mensejahterakan. Isi RUU ini saja kurang fokus pada industri prioritas yang tinggi penyerapan pekerja," ujar Hidayatulloh disela-sela resesnya.

Menurut anggota Fraksi PKS ini, kurang berkualitasnya RUU tersebut, bisa jadi karena RUU Omnibus Law kurang transparan dan cenderung

ditutup-tutupi sehingga sulit diakses publik. Hidayatullah bisa memaklumi respon kekecewaan rakyat, buruh, mahasiswa atau pun lembaga lembaga tersebut.

"Pemerintah jangan terburu-buru hingga abai dengan aspirasi rakyat. Apalagi dengan parlemen yang sudah dikuasai pendukung pemerintah. Alih-alih menciptakan lapangan kerja dan memajukan ekonomi justru akan membuat rakyat semakin terjepit. RUU ini bisa berdampak merugikan bagi ekonomi dalam negeri," ujar legislator asal Sumatera Utara ini.

Foto : dpr.go.id



BPK Diminta Bangun Sinergitas Dalam Akuntabilitas Keuangan Negara

"BPK tidak bisa berjalan sendiri, penting berbagai pihak seperti Pemerintah Daerah, DPRD, Perguruan Tinggi dan lembaga-lembaga lain untuk bersama-sama membangun sinergitas. Dengan sinergi tersebut diharapkan dapat menciptakan tata kelola keuangan negara yang akuntabel, transparan dan bebas dari korupsi,

Ir.H.A. JUNAIDI AULY, M.M

Anggota Komisi XI DPR RI Dapil Lampung II

Lampung (06/03) -- Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly mengatakan akuntabilitas keuangan negara tidak dapat berjalan secara parsial, penting berbagai pihak untuk bersinergi dalam implementasinya.

"BPK tidak bisa berjalan sendiri, penting berbagai pihak seperti Pemerintah Daerah, DPRD, Perguruan Tinggi dan lembaga-lembaga lain untuk bersama-sama membangun sinergitas. Dengan sinergi tersebut diharapkan dapat

menciptakan tata kelola keuangan negara yang akuntabel, transparan dan bebas dari korupsi," ujar Junaidi dalam acara kuliah umum dengan tema "Akuntabilitas Untuk Semua" di UIN Raden Intan, Bandar Lampung, Kamis, 5/3/2020.

Legislator asal Lampung ini menjelaskan, BPK sebagai lembaga negara diharapkan terus mendorong akuntabilitas termasuk didalamnya

pengelolaan keuangan pemerintah.

Lebih lanjut, politisi PKS dari dapil Lampung II ini mendorong audit BPK berjalan maksimal, hal ini penting dalam rangka mengurangi fraud dan atau dapat mencegah korupsi lembaga yang melakukan.

"Seluruh pihak agar kooperatif dalam operasionalisasi pemeriksaan oleh BPK, ini penting dalam rangka mewujudkan akuntabilitas yang substantif," tukas Junaidi.

Junaidi berharap pemeriksaan keuangan negara tidak hanya menyesuaikan dengan prinsip kepatuhan dan kewajaran saja, melainkan harus mengutamakan prinsip pencapaian sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.



Dua WNI Positif Corona, Mardani Minta Segera Bentuk Tim Khusus Tangani Covid-19

Kementerian Kesehatan perlu mendesak pemerintah untuk segera membentuk gugus tugas yang mengikutsertakan semua pihak yang terlibat. Gugus tugas itu harus melibatkan pakar, akademisi, termasuk Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri untuk hubungan di dalam dan di luar negeri. "Penanganan yang amatir akan sangat membahayakan masyarakat dan membuat wibawa bangsa kita dipandang rendah

Dr. H. MARDANI, M.Eng

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP) DPR RI

Jakarta (03/03) — Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Mardani Ali Sera menyerukan untuk segera dibentuk gugus tugas menyeluruh untuk menangani dan mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19 di Indonesia.

"Bentuk gugus tugas dan bangun komunikasi dengan mitra di luar negeri termasuk kerja sama antarparlemen untuk meminimalkan kasus COVID-19," kata Mardani saat

dihubungi di Jakarta, Senin.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan Kementerian Kesehatan perlu mendesak pemerintah untuk segera membentuk gugus tugas yang mengikutsertakan semua pihak yang terlibat.

Gugus tugas itu harus melibatkan pakar, akademisi, termasuk Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri untuk hubungan di dalam dan di luar negeri.

"Penanganan yang amatir

akan sangat membahayakan masyarakat dan membuat wibawa bangsa kita dipandang rendah," tuturnya.

Terkait dengan pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa sudah ada dua warga negara Indonesia yang dinyatakan positif terinfeksi COVID-19, Mardani mengatakan pengumuman tersebut jangan hanya disampaikan karena ada desakan publik.

"Transparansi dan sinergi menjadi kata kunci. Semua harus berbasis fakta yang dikawal secara akurat," katanya.

Mardani mengatakan masyarakat memiliki hak untuk mempertanyakan upaya pemerintah dalam menangani COVID-19, termasuk yang sedang menjadi perbincangan di media sosial tentang penanganan terhadap warga negara Indonesia yang baru pulang dari luar negeri.

"Kejadian di bandara seperti yang beredar di media sosial memang ada yang terjadi. Hak masyarakat mempertanyakan. Penanganan pemerintah harus super serius karena dalam era keterbukaan kita hidup dalam transparansi yang jelas," katanya.





FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, M.A
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI 2

**Reses, HNW Ikut
Kompetisi Catur Ber-
sama Warga Jaksel**

Menurut saya ini sangat baik untuk terus dikembangkan dan PKS mendukung olahraga catur ini. Karena dengan catur kita dibiasakan untuk berolahraga yang cerdas dan ber-visi,"

Reses Kedua, Sakinah Kunjungi Empat Kokab di Sulawesi Tengah

“Alhamdulillah, sebagai kesempatan pertama kami melaksanakan reses di Dapil ini, kami ingin membangun silaturahmi dengan teman-teman media. Kalian adalah yang terpenting dalam mendukung perjuangan kami. Tanpa kalian, mustahil perjuangan kami bisa tersyiar kepada masyarakat umum

Hj. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag

Anggota Komisi X DPR RI Dapil Sulteng

Sulawesi Tengah (05/03) — Dalam masa reses kedua kali ini, Anggota DPR-RI Fraksi PKS, Hj. Sakinah Aljufri, siap menjaring sebanyak-banyaknya aspirasi dari masyarakat Sulawesi Tengah, khususnya yang ada di Kota Palu, Kabupaten Sigi, Buol dan Poso.

“Dalam reses pertama kami selaku anggota DPR-RI, sudah mengunjungi Banggai, Banggai Laut, Banggai Kepulauan, Tojo Unauna dan Tolitoli. Reses kedua ini, kami

ke Palu, Sigi, Poso dan Kabupaten Buol, insya Allah,” kata cucu pendiri organisasi Alkhairaat, Kamis (05/03/2020).

Dalam kegiatan mengunjungi Daerah Pemilihannya, Sakinah mengau akan melakukan serap aspirasi sebanyak-banyaknya dari masyarakat Sulawesi Tengah yang diwakilinya di lembaga DPR-RI.

Anggota DPR-RI yang duduk di komisi X ini juga menambahkan, bahwa aspirasi yang akan diserap dan dia

perjuangan, tidak hanya yang terkait dengan mitra komisinya, namun semua aspirasi akan dicatat dan diajukan ke Fraksi PKS, untuk diperjuangkan bersama anggota DPR-RI lainnya dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS).

“Saya duduk di komisi X yang salah satunya membidangi masalah pendidikan. Namun bukan berarti bahwa saya hanya fokus dengan masalah pendidikan. Semua aspirasi akan saya catat, lalu kemudian saya bawa ke Fraksi. Nantinya yang bukan wilayah kerja saya, karena beda mitra komisinya, maka akan diperjuangkan oleh teman satu fraksi yang komisinya berkaitan dengan aspirasi tersebut,” katanya.

Salah satu contohnya, dalam reses kali ini, Sakinah mengagendakan untuk bersilaturahmi dengan pimpinan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. Secara kelembagaan, IAIN berada di bawah naungan Kementerian Agama, sehingga merupakan mitra komisi VIII. Namun



demikian, Sakinah akan bersilaturahmi dengan pimpinan IAIN dalam rangka menjangkau aspirasi dan informasi terkait usulan peningkatan status IAIN Palu menjadi Universitas Islam Negeri (UIN).

“Komisi saya juga berkaitan dengan pendidikan, maka secara tidak langsung juga terkait dengan usulan peningkatan status IAIN tersebut. Selain itu, saya juga secara pribadi sebagai abnau Alkhairaat, merasa terpenggil untuk ikut memperjuangkan IAIN Palu, sebagai salah satu institusi pendidikan agama Islam di Sulawesi Tengah,” tegasnya.

Dalam agenda yang telah disusun, dalam reses kali ini, Hj. Sakinah akan mengunjungi beberapa tempat. Salah

satunya, Pesantren Madinatul Ilmi di Dolo. Juga akan menghadiri kegiatan Wanita Islam Alkhairaat. Dalam rangkaian kegiatan di WIA, Hj. Sakinah juga termasuk jajaran Pengurus Besar (PB) Alkhairaat dan WIA, diagendakan untuk menyampaikan kuliah umum.

Reses Sakinah di Sulawesi Tengah, berlangsung sejak 5 Maret dan akan berakhir pada 18 Maret 2020. “Alhamdulillah, sebagai kesempatan pertama kami melaksanakan reses di Dapil ini, kami ingin membangun silaturahmi dengan teman-teman media. Kalian adalah yang terpenting dalam mendukung perjuangan kami. Tanpa kalian, mustahil perjuangan kami bisa tersyiar kepada masyarakat umum,” pungkasnya.

Toriq Hidayat Tinjau Lokasi Musibah Tanah Longsor di Cisayong Tasikmalaya

Ratusan jiwa di dua desa yang sempit terisolir terdiri dari 80 kepala keluarga (KK) atau 250 jiwa merupakan warga Desa Indrajaya, Kecamatan Sukaratu. Dan 90 KK atau 360 jiwa terdapat di Desa Santanamekar, Kecamatan Cisayong. Alhamdulillah saat ini sudah mendapatkan akses jalan

KH. TORIQ HIDAYAT, Lc

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jabari XI

Tasikmalaya (05/03) — Saat reses DPR RI, Anggota Komisi I Toriq Hidayat mendapatkan informasi dari Pengurus Cabang PKS Cisayong bahwa terjadi musibah tanah longsor di daerahnya. Cuaca buruk menyebabkan bencana longsor di Desa Santanamekar Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Jumat (28/02/2020).

Anggota Fraksi PKS ini segera meninjau Desa Santanamekar tempat terjadinya musibah.

Toriq mengatakan, material longsor sempit menutup akses jalan yang menyebabkan ratusan warga di Desa Santanamekar dan Desa Indrajaya terisolir. Bahkan salah seorang tokoh setempat, Bapak Didi (63 th) menjadi korban tertimbun.

"Daerah ini termasuk rawan bencana. sebelumnya juga terjadi longsor di Cisayong menimpa areal pesawahan. Akses jalan ke Desa Santanamekar sempit tertutup," ujar Toriq saat di

lokasi kejadian.

BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dibantu TNI/Polri dan warga setempat berupaya membuka akses jalan tersebut dengan membuat jembatan darurat.

"Ratusan jiwa di dua desa yang sempit terisolir terdiri dari 80 kepala keluarga (KK) atau 250 jiwa merupakan warga Desa Indrajaya, Kecamatan Sukaratu. Dan 90 KK atau 360 jiwa terdapat di Desa Santanamekar, Kecamatan Cisayong. Alhamdulillah saat ini sudah mendapatkan akses jalan", ujar Toriq.

"Saya dan seluruh kader PKS turut berduka cita atas musibah ini. Kami akan membantu sekuat tenaga untuk meringankan beban warga yang terkena musibah. Semoga warga yang mengalami musibah ini diberikan kekuatan dan kesabaran oleh Allah SWT", Doa Toriq.

Toriq Hidayat memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada TNI, BPBD dan pihak



pemerintah setempat serta pengurus PKS Cisayong yang responsif. sejak awal kejadian hingga saat ini terus melakukan bantuan dan evakuasi kepada warga yang terdampak bencana serta pencarian korban tertimbun longsor.

"Mengingat kecamatan Cisayong termasuk daerah

rawan bencana saya minta kepada pihak pemerintah, BPBD dan TNI setempat agar mensosialisasikan kepada warga untuk menghindari wilayah longsor karena kondisi tanah yang labil dan apabila hujan turun setelah longsor terjadi, sebagai antisipasi longsor susulan", Tutup Toriq.

Sosialisasi UU, Ahmad Syaikhul Bertemu Pejabat Pemkab Karawang dan LSM



Bekasi (05/03) — Anggota DPR RI Ahmad Syaikhul mensosialisasikan UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Politisi PKS itu memaparkan isi undang-undang tersebut, kepada 6 Kepala Dinas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang dan jajarannya.

Dalam penjelasannya, Syaikhul menyatakan bahwa UU No. 17 Tahun 2019 merupakan revisi dari UU No. 7 Tahun 2004. Revisi dilakukan, salah

satunya karena UU lama berwajah liberal yang memungkinkan dikuasainya sumber daya air oleh pihak asing.

"UU yang baru ini protektif. Tidak lagi liberal. Tapi justru melindungi potensi sumber daya air kita dari penguasaan orang asing," ungkap Syaikhul.

Mantan Wakil Walikota Bekasi itu juga menjelaskan bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang penting. Setiap aktivitas

ekonomi yang dilakukan setiap harinya tidak terlepas dari peranan air. Karena itu, negara perlu mengatur objek strategis tersebut agar dikelola dengan baik. Negara hadir melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi landasan pengelolaan air.

"Air merupakan objek strategis dan vital. Karena itu negara harus hadir mengelola melalui peraturan perundang-undangan," kata Syaikhul.

Untuk itu, Syaikhul

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang penting. Setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan setiap harinya tidak terlepas dari peranan air. Karena itu, negara perlu mengatur objek strategis tersebut agar dikelola dengan baik. Negara hadir melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi landasan pengelolaan air. Air merupakan objek strategis dan vital. Karena itu negara harus hadir mengelola melalui peraturan perundang-undangan

H. AHMAD SYAIKHU

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jabar VII

mengajak semua pemangku kebijakan bersama-sama memajukan Karawang dengan memaksimalkan potensi sumber daya air.

"Mari kita bersama-sama memajukan Karawang. Saya di legislatifnya, dan bapak ibu di eksekutifnya," ajak Syaikhul yang duduk di Komisi V DPR RI.

Hadir dalam acara tersebut antara lain Kepala

Dinas PUPR Dedi Ahdia, Kepala Dinas LH dan Kebersihan Wawan, Kepala Dinas Pangan Kadarisman, Kepala Dinas PRKP Ramon, Kepala Bappeda Asip, dan Dirut PDAM Muhammad Sholeh serta LSM Sahabat Lingkungan.

Reses di Bone, Andi Akmal Imbau Warga Perbanyak Konsumsi Ikan

Kalau masyarakat Bone mau cerdas dan sehat, harus banyak makan ikan, apalagi Bone ini punya potensi kelautan yang cukup untuk ikan,”

Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P.,M.M.

Anggota Komisi IV DPR RI Dapil Sulsel

Makassar (03/03) – Anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin mengta melakukan kunjungan kerja di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lonrae, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Rabu (03/03/2020).

Dalam kunjungan itu, Andi Akmal mensosialisasikan program Safari Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makanan Ikan).

Andi Akmal mengimbau kepada masyarakat Kabupaten

Bone untuk rajin mengkonsumsi ikan. Dengan tujuan, mencegah stunting dan penguatan SDM.

“Kalau masyarakat Bone mau cerdas dan sehat, harus banyak makan ikan, apalagi Bone ini punya potensi kelautan yang cukup untuk ikan,” kata Akmal.

Andi Akmal memastikan siap untuk membantu masyarakat Bone untuk pengembangan perikanan dan kelautan.

“Bentuk nyatanya, dengan

memberikan bantuan alat tangkap, kapal penangkap ikan, ikan, benih, pelatihan dan juga pemberdayaan kepada masyarakat pesisir,” kata Akmal yang digadang-gadang maju di Pilkada Bone 2024.

Diketahui, reses tersebut juga dihadiri Wakil Bupati Bone, Ambo Dalle, Ketua TP PKK Kab Bone dan unsur kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI.



Hadiri Reses, Andi Akmal Beri Bantuan Sejumlah Nelayan dan Petani

potensi kelautan dan perikanan yang ada di Bone sangat luar biasa. Ia menegaskan, sangat perlu ada sinergitas yang terjalin antar Pemda, Provinsi dan Kementerian untuk kesejahteraan nelayan. “Apalagi Bone terkenal dengan Budidaya Kepiting dan bandeng, hadirnya komisi IV di Bone agar masyarakat merasakan kehadiran kami berkontribusi untuk kesejahteraan masyarakat”

Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P.,M.M.

Anggota Komisi IV DPR RI Dapil Sulsel

Bone (04/03) — Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin memiliki peran penting dalam mendorong kemajuan pembangunan di Kabupaten Bone. Tak sedikit bantuan yang mengalir ke Kabupaten Bone dari sektor pertanian, berkat tangan dingin dari politisi PKS ini.

Untuk tahun 2020 ini, mantan Ketua DPW PKS Sulsel itu kembali membuktikan

perjuangannya di DPR. Total Rp 50 miliar bantuan untuk sektor kelautan dan perikanan akan masuk ke Bone.

Bantuan tersebut berupa kapal nelayan dan alat tangkap serta bantuan lainnya untuk petani rumput laut.

Usai menghadiri safari Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemar Ikan) di PPI Lonrae, Selasa, (03/03/2020),

Akmal mengatakan bantuan tersebut untuk masyarakat nelayan dan petani rumput laut.

Ia menegaskan, pada tahun 2020 ini, salah satu fokus perjuangannya adalah mendorong pembangunan di sektor kelautan dan perikanan.

“Izin pak wakil bupati, ke depan ini akan ada banyak kegiatan yang akan saya gelar di Bone. Saya akan membawa Dirjen dari Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun dirjen dari Kementerian Pertanian. Kita mau, Bone ini semakin maju di semua sektor pembangunan,” tegas Akmal saat menyampaikan sambutan di acara safari tersebut.

Ia juga meminta agar agenda dan perjuangannya untuk Masyarakat Bone tidak dikaitkan dengan politik.

“Politik itu masih lama. Jadi jangan dikaitkan. Ini murni perjuangan saya bagaimana Masyarakat semakin sejahtera. Perekonomiannya semakin meningkat,” tukasnya.

“Saya ingin berguna bagi



masyarakat. Bukan hanya datang saat mau kampanye,” tegas Akmal.

Akmal juga menegaskan, potensi kelautan dan perikanan yang ada di Bone sangat luar biasa. Ia menegaskan, sangat perlu ada sinergitas yang terjalin antar Pemda, Provinsi dan Kementerian untuk kesejahteraan nelayan.

“Apalagi Bone terkenal dengan Budidaya Kepiting dan bandeng, hadirnya komisi IV di Bone agar masyarakat merasa-kan kehadiran kami berkontri-

busi untuk kesejahteraan masyarakat” tegasnya.

Safari Gemar ikan yang dimotori Akmal, turut dihadiri Direktur Pemasaran Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Mahmud SP MSc, Wakil Bupati Bone, H Ambo Dalle, Kepala UPT Pelabuhan Sulsei, Kepala CDK Bosowasi, Ketua Tim Penggerak PKK Bone Hj Kurniati A Fahsar SH Spec Not, Kadis Perikanan Bone, Hj Wahidah dan Tripika Kecamatan Tanete Riattang Timur.

Dikunjungi Milenial PKS

Anis Byarwati Berpesan Agar mempersiapkan Diri Pegang Estafet Kepemimpinan

Masa depan bangsa di tangan para pemuda dan harus mempersiapkan diri untuk memegang estafet kepemimpinan, baik dilevel Provinsi bahkan Nasional

Dr. HJ. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI 1

Jakarta – Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Anis Byarwati dikunjungi sejumlah pemuda pemuda keren milenial dari PKS, dirinya meminta untuk mempersiapkan diri memegang estafet kepemimpinan. Pemuda-pemuda milenial ini berasal dari Gerakan Persaudaraan Pemuda Keadilan (Gema Keadilan) DKI Jakarta yang dipimpin Noval Abuzar dan Ganuda Keadilan (GK) DKI Jakarta yang digawangi Faris Mujahid. Selasa (3/3/2020) di Rumah Aspirasi Anis Byarwati di Jakarta Timur.

Dalam pertemuan tersebut banyak permasalahan yang

disampaikan Anis kepada para pemuda dan solusi solusinya. Anis menjelaskan dua garis utama kerja Anggota DPR, yaitu masa sidang di mana anggota Dewan bekerja di DPR atau bersama mitra, dan masa reses di mana anggota dewan bekerja bertemu dan dengan konstituen dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Dirinya juga menyinggung peran pemuda saat ini untuk menyongsong kepemimpinan dimasa mendatang.

"Masa depan bangsa di tangan para pemuda dan harus mempersiapkan diri untuk memegang estafet

kepemimpinan, baik dilevel Provinsi bahkan Nasional," terang Anis kepada sejumlah pemuda.

Sementara itu, ditempat yang sama, Ketua GK DKI Jakarta Faris Mujahid mengatakan, hasil dari silaturahmi tersebut diantaranya akan ada pertemuan rutin satu bulan sekali. Anak muda PKS bersama Anis Byarwati untuk berdiskusi permasalahan bangsa dan kajian peningkatan diri. Anis juga sebagai anggota Komisi XI DPR RI akan membantu agar anak-anak muda se-Jakarta dapat mengkakes program-program ekonomi kreatif yang menjadi mitra komisinya.

"Di era ini, anak-anak muda harus aktif terlibat dalam pembahasan isu ekonomi bangsa. Belajar dari para ahli dan pemangku kebijakan, supaya mampu memahami kondisi dengan baik dan kemudian melakukan aktivitas



yang produktif terkait hal tersebut," ujar Faris.

Faris juga menambahkan, pertemuan rutin tersebut diharapkan akan berjalan sesuai rencana. Dan hasil dari pertemuan tersebut mampu menjadi referensi bagi para pemuda memahami isu yang sedang terjadi di Indonesia.

Selain itu, Ketua GEMA Keadilan DKI Jakarta Noval Abuzar menyambut baik hasil

pertemuan tersebut dan bersama GK DKI Jakarta akan menyiapkan langkah-langkah kongret untuk mengeksekusi hasilnya.

"Kami menyambut baik, dan semoga kami bisa berkolaborasi bersama GK melakukan langkah-langkah kongkret kedepannya," kata Noval.

Saat Reses, Hermanto Sampaikan Nilai Demokrasi di Unkris

Sistem politik adalah sistem kekuasaan untuk mewujudkan cita-cita mulia dalam membangun peradaban, negara, kemanusiaan dan dunia. Ontologi, epistemologi dan aksiologi politik yang benar dapat mengarahkan praktek politik pada tujuan mulia. "Keluasan dalam penguasaan ketiga hal tersebut melahirkan konsistensi dan komitmen politik untuk membangun bangsa dan negara

Dr. HERMANTO, S.E., M.M

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumber 1

Jakarta (03/03) — Anggota DPR dari FPKS Hermanto dalam resesnya bertemu Mahasiswa Unkris menyebutkan, sejatinya demokrasi tidak melahirkan oligarki politik dan kekuasaan yang terpusat pada beberapa orang.

Namun karena praktek politik yang berbiaya tinggi, lanjut Hermanto, akhirnya politik dikuasai oleh para pemilik modal dan orang tertentu yang dapat mendapat partisipasi masyarakat.

"Akibatnya, kekuasaan

politik didominasi oleh para oportunist dan hipokrit yang berorientasi mengejar kepentingan pribadi dan meraih rente politik", papar Hermanto dalam sambutan pelantikan pengurus baru KAHMI Rayon Universitas Krisnadwipayana 2020-2025 belum lama ini.

"Sistem politik dan demokrasi haruslah berjalan seiring dan seimbang agar tidak muncul oligarki kekuasaan", tambahnya.

Menurutnya, sistem politik adalah sistem kekuasaan untuk

mewujudkan cita-cita mulia dalam membangun peradaban, negara, kemanusiaan dan dunia. Ontologi, epistemologi dan aksiologi politik yang benar dapat mengarahkan praktek politik pada tujuan mulia. "Keluasan dalam penguasaan ketiga hal tersebut melahirkan konsistensi dan komitmen politik untuk membangun bangsa dan negara", ucapnya.

Adapun demokrasi, katanya, prinsip dasarnya adalah pelibatan partisipasi masyarakat seluas luasnya untuk meraih dukungan. Setelah itu demokrasi menghasilkan kekuasaan yang terdistributif yang disertai kanal partisipasi masyarakat kedalam sistem pengambilan keputusan politik di pusat kekuasaan.

"Kekuasaan perlu check and balance agar tidak berjalan sendiri tanpa kontrol", ujar Hermanto.

Demokrasi hendaknya berbasis pada sistem, agar politik tidak bergantung pada seseorang yang condong pada menutup akses dan kanal.

"Hal ini selaras dengan jiwa demokrasi yang bersifat musyawarah dan mufakat", tuturnya.



"Saatnya kaum intelektual muslim kontemporer dan aktivis pergerakan memahami hal tersebut agar terhindar dari pragmatisme politik dan politik praktis yang sering mengaburkan tujuan mulia politik", tandas Hermanto.

Indonesia telah melampaui tiga generasi dari sejak kemerdekaan. Sudah saatnya generasi baru memimpin negeri ini.

"Negeri ini membutuhkan kaum muda yang cerdas, energik, peduli dan tidak melupakan sejarah bangsa dan

negara", ungkapnya.

"Generasi muda pewaris negeri ini perlu menguasai cara pandang yang bersifat komprehensif serta berkelanjutan dalam hal melihat, menganalisa dan mengambil keputusan politik dan ekonomi untuk menghadirkan rasa keadilan, kesejahteraan dan kedamaian agar pembangunan disegala bidang dapat berjalan dengan baik", pungkas legislator dari Dapil Sumber 1 ini.

Hadiri Haul Abah Guru Sekumpul Ke 15

Habib Aboe: Acara ini Bermanfaat Tumbuhkan Semangat Gotong Royong

Utamanya dalam meneguhkan rasa persatuan dan kesatuan. Masyarakat datang dari berbagai penjurur untuk menghadiri acara haul sekumpul, ini tentunya membuat rasa persatuan kita semakin kuat

HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Kalsel I

Kalimantan (02/03) -- Dalam rangkaian reses, Anggota DPR RI Aboe Bakar Alhabsy menghadiri Haul sekumpul yang juga dihadiri para habib dan ulama di Kalimantan, Ahad, (01/03/2020).

Menurut pria yang akrab disapa Habib Aboe ini menyatakan Haul sekumpul ini membawa makna yang mendalam untuk bangsa dan negara.

"Utamanya dalam meneguhkan rasa persatuan dan kesatuan. Masyarakat datang dari berbagai penjurur

untuk menghadiri acara haul sekumpul, ini tentunya membuat rasa persatuan kita semakin kuat", terangnya.

Selain itu, habib Aboe menambahkan kegiatan haul juga menumbuhkan rasa gotong-royong. Dimana masyarakat saling membantu, menyediakan posko di sepanjang jalan Ahmad Yani.

"Mereka bergotong royong membuat posko dan menyediakan tempat istirahat serta makanan secara gratis", ungkapnya.

Kegiatan seperti ini, lanjut pria yang juga sebagai Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan ini sangat bermanfaat untuk menumbuhkan gotong royong yang selama ini telah memudar di tengah masyarakat.

"Tentunya kondisi seperti ini sangat menguntungkan untuk pemerintah daerah setempat. Selain menggerakkan roda perekonomian daerah, kohesi sosial juga semakin membaik. Nilai persatuan dan kesatuan menguat, kegiatan gotong royong kembali tumbuh dan berkembang di masyarakat. Tentunya, semuanya akan membawa dampak stabilitas sosial dan kondisi masyarakat yang semakin tentram," ungkap Anggota Komisi III DPR RI ini.

Oleh karenanya, diakhir Habib Aboe mengatakan pemerintah daerah setempat sudah selayaknya memberikan dukungan yang optimal untuk kegiatan haul sekumpul. Karena manfaat dan dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat.



Manfaatkan Masa Reses,

Sakinah Aljufri Hadiri Pelatihan Perempuan Siaga

“terima kasih yang terus menyemangati kita, yang insya Allah berkat kebersamaan kita saling menguatkan kita agat tetap eksis dan tentunya selalu akan lebih baik kedepannya”

Hj. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sulteng

Jakarta (08/03) — Memanfaatkan masa reses Anggota DPR RI Fraksi PKS Sakinah Aljufri, menghadiri Latansa (Pelatihan Perempuan Siaga) yang dilaksanakan DPW PKS Sulawesi Tengah, di bumi perkemahan Oloboju, yang dilaksanakan (07-08/03/2020).

Dalam sambutannya anggota Komisi X DPR RI menyampaikan terima kasih kepada seluruh kader PKS.

“terima kasih yang terus menyemangati kita, yang insya Allah berkat kebersamaan kita saling menguatkan kita agat tetap eksis dan tentunya selalu akan lebih baik kedepannya”, tutur Srikandi Senayan Dapil Sulawesi Tengah.

Tak lupa Sakinah juga

berterima kasih kepada anggota perempuan DPR se Sulawesi Tengah yang terus eksis membuktikan kiprah kerjanya di tengah-tengah masyarakat melalui berbagai kegiatan.

“Kita pulang dari sini, kekuatan kita, inerbiuti kita, semangat kita akan berlipat ganda dengan kegiatan ini,” pungkasnya.

Sakinah berharap dengan mengikuti kegiatan latansa, kader perempuan PKS bisa saling mengingatkan.

“Dalam organisasi dakwah ini kita saling mengingatkan, saling menguatkan, saling memberikan semangat” terang Sakinah.

Dalam tugas menjalankan tugas dan amanah menjadi

wakil rakyat di DPR RI reses merupakan kegiatan serap aspirasi dari masyarakat.

“Masa reses adalah menjangkir aspirasi, kita pulang ke rumah bukan untuk liburan, bukan untuk berdiam diri, bukan untuk berhura-hura akan tetapi sesungguhnya ini bekerja, kerja untuk bertatap muka dengan konstituen, dengan seluruh masyarakat di dapil. Periode reses yang lalu saya berada di 39 titik di Sulawesi Tengah dari Kota Palu, Sigi dan Donggala, Parimau, Poso, Morowali Utara dan kecamatan-kecamatan yang lain”, terang Sakinah.

Kegiatan Pelatihan Perempuan Siaga DPW PKS Sulawesi Tengah ini diikuti oleh ratusan kader perempuan DPW PKS Sulawesi Tengah dan dibuka oleh Ketua DPW PKS Sulawesi Tengah Muhamad Wahyuddin.

“Latansa tidak hanya sebagai ajang penguatan ruhiah, akan tetapi juga penguatan intelektual dan jasadiyah kader perempuan PKS”, ungkap Sakinah



Reses, Mufida Ajak Walikota Bersinergi dengan Camat & Lurah Cegah Virus Corona

"Pemerintah siap, Pak Menkes sedang mengambil sampel untuk diteliti lebih lanjut. Alhamdulillah Gubernur DKI sudah lebih dulu menunjukkan kesiapannya menghadapi Covid 19. Kami optimis DKI Jakarta, dan khususnya Jakarta Selatan siap menghadapi masalah ini,

Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si

Anggota Komisi IX DPR RI Dapil DKI Jakarta 2

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diyakini siap menghadapi merebaknya wabah Virus Corona (Covid-19). Untuk itu, para Wali Kota diminta bersinergi dengan para Camat dan Lurah sebagai ujung tombak yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Kurniasih Mufidayati mengungkapkan hal tersebut saat menggelar reses di Ruang Rapat Wali Kota Jakarta Selatan, Jumat 6 Maret 2020.

Anggota dewan dari Dapil DKI Jakarta 2 yang meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Luar Negeri ini memaparkan rencana kegiatannya selama masa reses di daerah Jakarta Selatan.

"Pemerintah siap, Pak Menkes sedang mengambil sampel untuk diteliti lebih lanjut. Alhamdulillah Gubernur DKI sudah lebih dulu menunjukkan kesiapannya menghadapi Covid 19. Kami optimis DKI Jakarta, dan khususnya Jakarta Selatan siap menghadapi masalah ini," ujar

Mufida.

Karena itu, Mufida mengajak Wali Kota Jakarta Selatan untuk fokus kepada isu nasional yang belakangan merebak di Indonesia, salah satunya penanganan Covid-19.

"Kita bisa bersinergi dalam kegiatan gerakan masyarakat sehat, memberikan informasi dan edukasi tentang COVID-19" ajak Mufida

Sementara itu, Wali Kota Jakarta Selatan Marullah Matali menanggapi uraian Mufida membenarkan, isu virus Corona memang sepatutnya diperhatikan serius. Marullah mencontohkan, kawasan Kemang yang terkenal akan karaoke dan diskotek berangsur sepi.

"Kalau antispasi soal penyakit, teman-teman sudah siap. Dari tenaga kesehatan paling banyak berkorban. Makanya saya mengutip pernyataan Pak Gubernur 'Pak dokter jaga kesehatan mu dan teman-temanmu. Karena memang mereka yang harus lebih waspada,' ungkapnya.



Marullah juga mengingatkan jajarannya untuk bisa mengikuti kegiatan reses anggota dewan baik DPR RI maupun DPRD DKI.

"Saya monitor semua

reses, kita sudah komit dan tidak ada yang mangkir dari pendampingan reses. Baik datang datang dari DPR maupun DPRD, mereka pasti mendampingi," imbuhnya. (*)

Reses Dimanfaatkan HNW Ikut Kompetisi Catur Bersama Warga Jaksel

Menurut saya ini sangat baik untuk terus dikembangkan dan PKS mendukung olahraga catur ini. Karena dengan catur kita dibiasakan untuk berolahraga yang cerdas dan ber-visi,"

Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI 2

Jakarta (02/03) — Anggota DPR RI Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) memanfaatkan waktu resesnya untuk mengikuti kompetisi catur bersama warga di Jakarta Selatan, Sabtu, (29/02/2020).

HNW yang juga Wakil Ketua MPR RI ini menyatakan bahwa Catur sebagai olahraga sangat baik dikembangkan.

"Menurut saya ini sangat baik untuk terus dikembangkan dan PKS mendukung olahraga catur ini. Karena dengan catur kita dibiasakan untuk berolahraga yang cerdas dan ber-visi," ungkapnya.

Disamping itu, lanjut HNW melalui catur warga dibiasakan berpikir dan bertindak yang positif tiga langkah ke depan.

"Juga melalui olahraga catur warga dibiasakan untuk

berkehidupan sosial yg rukun dan damai. Tidak pernah ada tawuran antara pemain maupun supporter catur. Malah dalam catur tak dikenal sekedar menang atau kalah namun juga dikenal draw/remis". Hal ini disampaikan HNW saat menutup turnamen Catur 1 yg diselenggarakan oleh FKPPi Jaksel.

"Turnamen catur ini memperebutkan Piala Walikota Jakarta Selatan, Kapolres Jakarta Selatan dan Dandim Jakarta Selatan. Selain itu juga ada piala bergilir Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, yang disiapkan panitia, ungkap Eka sebagai pelaksana turnamen catur.

Acara pertandingan catur ini di gelar di SD Bhayangkari Komplek Polri Ragunan. Acara

turnamen catur ini diikuti oleh 50 orang peserta yang berasal dari beragam profesi dan usia.

Panitia acara turnamen catur ini berharap acara semacam ini dapat digelar tiap tahun untuk memunculkan bibit potensial serta menumbuhkan semangat kompetisi sehat antar pecinta olahraga catur.

Pembukaan turnamen catur ini juga dihadiri oleh perwakilan Kapolres Jakarta Selatan dan Dandim Jakarta Selatan serta tokoh masyarakat di wilayah Jakarta Selatan.

Acara pertandingan perseorangan dimulai pada pukul 09.30 dan ditutup dengan eksibisi antara Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid melawan M. Nur juara pertama perseorangan. Pertandingan eksibisi berjalan cukup sengit. Dan pertandingan pun berakhir remis.

Panitia acara, Eka, yang juga pengurus FKPPi mengapresiasi dukungan berupa uang pembinaan sebesar Rp. 12.000.000,- dan piala bergilir yang diberikan Hidayat Nur Wahid dalam acara pertandingan catur se-Jakarta Selatan.



Sambangi Kokab di Sumut, Iskan Sosialisasikan Dua RUU Pamungkas

"PKS ini memang corong umat, menjadi penyambung lidah masyarakat di gedung dewan, harapan kami program yang dihasilkan dapat dirasakan kebaikannya oleh seluruh masyarakat Indonesia"

H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.

Anggota Komisi VIII DPR RI Dapil Sumut 2

Medan (06/03) — Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis, dalam reses dan serap aspirasinya di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapteng, Sumatera Utara menyampaikan dan mensosialisasikan 2 RUU yang sedang diperjuangkan PKS, yaitu RUU Ketahanan Keluarga dan RUU Perlindungan Tokoh agama dan Simbol Agama. Bahkan saat ini RUU KK sudah sampai tahap Harmonisasi.

Iskan menjelaskan dua RUU ini masuk dalam prolegnas (program legislasi nasional) tahun ini.

"Walaupun banyak pertentangan pro dan kontra di kala-

ngan elit maupun masyarakat, saya yakin dua RUU ini akan membawa kebaikan bagi masyarakat Indonesia," tuturnya

Politisi PKS ini menyebutkan, RUU ketahanan keluarga sebagai langkah preventif dalam menciptakan keluarga yang harmonis.

"Jangan sampai berfikir apriori dulu, belum apa-apa sudah dikatakan melanggar HAM, atau terlalu ikut campur urusan rumah tangga. Coba ambil sudut pandang yang lebih luas, bahwa adanya RUU Ketahanan Keluarga ini, kita berharap angka kejahatan seksual, atau perilaku amoral lainnya bisa berkurang," pungkasnya.

Membangun negara ini, tetap Iskan, dimulai dari sebuah institusi terkecil, yaitu keluarga.

"Baiknya suatu keluarga, mulai dari pengelolaannya, keharmonisan yang diciptakan di keluarga tersebut, maka akan membuat negara ini juga akan baik", tuturnya.

Selain itu, Iskan melanjutkan, RUU perlindungan tokoh agama dan simbol agama juga merupakan hal yang krusial yang harus diperjuangkan.

"Berapa banyak ulama-ulama kita yang di kriminalisasikan, bahkan tersebar diseluruh wilayah negeri. Kita menyangkan langkah diam yang diperlihatkan pemerintah ketika kasus tersebut terjadi. Padahal kita harus tahu sejarah kemerdekaan Republik ini, tak pernah lepas dari perjuangan Ulama-ulama kita juga kan ?," tanya Iskan.

Iskan menambahkan bahwa RUU ini untuk melindungi para tokoh agama, bukan hanya islam, tetapi seluruh agama yang diakui oleh pancasila, baik itu Kristen, Protestan, Hindu,



Budha, maupun Konghuchu.

"Biarkan tokoh agama masing-masing agama tersebut menyampaikan terminologi agama sesuai dengan tuntunannya", tandasnya.

Dilain sisi, Iskan juga menyampaikan perlindungan yang dimaksud seperti hak imunitas yang dimiliki DPR, bukan berarti DPR dilindungi dari sentuhan hukum, tapi itu hanya ketika menjalankan tugas.

"Jadi, sepanjang para tokoh agama menyampaikan ajaran berdasarkan kitab suci, ujar iskan, maka tidak boleh ada pihak manapun yang bisa melakukan persekusi atau kriminalisasi atas ajaran yang disampaikan," lanjut Iskan.

Jadi menurut Iskan,

kedudukan tokoh agama di mata hukum juga tetap sama, ketika tokoh agama melakukan tindak pidana atau melanggar hukum, tetap harus menjalankan proses hukum yang sama dengan lainnya.

Para Tokoh masyarakat Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah turut antusias dan menyatakan dukungan atas perjuangan PKS tersebut.

"PKS ini memang corong umat, menjadi penyambung lidah masyarakat di gedung dewan, harapan kami program yang dihasilkan dapat dirasakan kebaikannya oleh seluruh masyarakat Indonesia" ujar salah satu tokoh masyarakat yang hadir pada reses tersebut. Selengkapnya di fraksi.pks.id

Hadiri Reses, Nur Azizah Sampaikan Tentang Pendidikan di Kota Depok

Kami sudah usulkan terkait dengan penambahan biaya pendidikan langsung melalui Direktur KSKK (Kurikulum Saranaprasarana Kesiswaan Kelembagaan) Kemenag RI. Kemenag sangat responsif dan InsyaAllah kita berharap semoga segera terlaksana apa yang menjadi program kebaikan ini

Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A.,M.A.

Anggota Komisi VIII DPR RI Dapil Jabar VI

Depok (07/03) — Memenuhi masa reses kedua, Anggota DPR RI Nur Azizah Tamhid menggelar pertemuan bersama kader dan simpatisan PKS di RM Dapur Wonogiri Jl. Tole Iskandar No. 07 Sukamaju Cilandong Depok.

Nur Azizah Tamhid mengadakan reses bersama anggota DPRD Kota Depok Muhammad Suparyoni & Pengurus MT Al-Mubarakah Sukmajaya Jum'at, (06/03/2020).

Dalam kesempatan tersebut Nur Azizah menyampaikan hal yang terkait dengan pendidikan di MIN, MTsN & MAN di Depok.

"Kami sudah usulkan terkait dengan penambahan biaya pendidikan langsung melalui Direktur KSKK (Kurikulum Saranaprasarana Kesiswaan Kelembagaan) Kemenag RI," ungkap Nur Azizah.

Anggota Komisi VIII ini juga menyampaikan bahwa pihak

Kemenag sudah merespon dan akan menindaklanjuti.

"Kemenag sangat responsif dan InsyaAllah kita berharap semoga segera terlaksana apa yang menjadi program kebaikan ini", tutup Nur Azizah.



Reses, Nevi Zuairina Inisiasi Pelatihan Pengolahan Sabut Kelapa untuk UMKM

Pelatihan ini sangat baik buat menumbuhkan semangat kewirausahaan Nasional kita di kalangan masyarakat menengah dan bawah. Perlu di akui, kontribusi UMKM sangat signifikan menyumbang pertumbuhan ekonomi negara kita

Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Sumbar II

Padangpariaman (07/03) — Anggota Komisi VI DPR, Nevi Zuairina pada saat reses masa sidang II bersama dengan mitra komisi VI DPR, PT Angkasa Pura II Cabang Bandara Internasional Minangkabau (BIM) mengadakan pelatihan sabut kelapa untuk UMKM yang dimulai Kamis (5/3) hingga Rabu (11/3) mendatang.

Pada pembukaan pelatihan dan penyerahan bantuan AP II ini, turut hadir Senior General Manager (SGM) Of Community Development AP II Amirzal, serta Ketua Forum UMKM Sumbar Nevi Zuairina.

Pelatihan pengolahan sabut kelapa ini diperuntukkan kepada pelaku UMKM, kepada 30 orang, sekaligus penyerahan satu unit bangunan Puskesmas pembantu dari program monumental 2019 Angkasa Pura berupa bantuan program bina lingkungan perusahaan pelat merah ini, yakni satu unit bangunan Puskesmas pembantu untuk Jorong Tabek Kanagarian Katapang Kabupaten Padangpariaman senilai Rp 214 juta.

Nevi Zuairina yang sebagai anggota DPR RI dapil Sumatera Barat, juga ketua Forum UMKM

Sumatera Barat ini mengatakan, bahwa dengan adanya pelatihan ini akan menghadirkan mindset baru bagi masyarakat untuk membuka peluang munculnya jiwa kewirausahaan.

"Pelatihan ini sangat baik buat menumbuhkan semangat kewirausahaan Nasional kita di kalangan masyarakat menengah dan bawah. Perlu di akui, kontribusi UMKM sangat signifikan menyumbang pertumbuhan ekonomi negara kita", ucap Nevi

Memang, sebut Nevi Zuairina, dunia kewirausahaan menjadi salah satu solusi pemerintah mengkurangi angka pengangguran yang kini mencapai 25 juta jiwa di Indonesia. Politisi PKS ini menambahkan, sesuai data statistik Sumbar, jumlah UMKM ada sebanyak 593.100. Dari jumlah tersebut, terdiri dari Mikro sebanyak 531.350 atau 89,59 persen.

Sedangkan pelaku usaha kecil sebanyak 53.431 atau 9,01 persen, pelaku usaha menengah sebanyak 7.990



atau 1,33 persen. Para pelaku usaha jenis ini bergerak di berbagai bidang usaha, misalnya usaha kuliner, souvenir dan lainnya.

"Kita tahu bila stabil ekonominya negara didapat dengan banyak masyarakat yang buka usaha UMKM sehingga ini membuka lapangan kerja baru," sebut Nevi Zuairina lagi.

Keberadaan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mendapat perhatian PT Angkasa Pura II Cabang

Bandara Internasional Minangkabau (BIM). Nevi juga berharap bersyukur atas adanya pelatihan pengolahan sabut kelapa dari Angkasa Pura II BIM ini.

"Sasaran pelatihan ini adalah membina kelompok industri kecil rumah tangga. Saya berharap melalui pelatihan ini dapat meningkatkan pengetahuan peserta, dan juga bisa meningkatkan ekonomi keluarga," tutup Nevi Zuairina.

Potensi Bencana Jateng Tinggi, Bukhori: BNPB Perlu Diperkuat!

“Cara kita mengantisipasi ancaman bencana di Jawa Tengah juga perlu dilakukan melalui pendekatan kelembagaan (institutional approach). BPBD perlu diperkuat dalam aspek organisasi, lembaga, dan pengaturan pendanaan. Apalagi, anggaran penanggulangan bencana untuk tingkat kota atau kabupaten sangat terbatas”

KH. BUKHORI, Lc., M.A

Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Jateng

Jawa Tengah (07/03) — Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf menyatakan bahwa Jawa Tengah termasuk wilayah dengan potensi bencana yang tinggi. Hal ini sejalan dengan data yang dirilis oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah yang mencatat telah terjadi 2.179 kasus bencana alam sepanjang 2019. Bukhori menambahkan, dalam upaya merespon ancaman tersebut diperlukan penguatan bagi penyelenggara kebijakan

“Cara kita mengantisipasi ancaman bencana di Jawa

Tengah juga perlu dilakukan melalui pendekatan kelembagaan (institutional approach). BPBD perlu diperkuat dalam aspek organisasi, lembaga, dan pengaturan pendanaan. Apalagi, anggaran penanggulangan bencana untuk tingkat kota atau kabupaten sangat terbatas” ujar politisi PKS ini disela kunjungan kerja ke kantor BPBD Jawa Tengah, Jumat (6/3)

la menambahkan, penyempurnaan secara struktur dan lembaga dimaksudkan agar BPBD lebih enerjik dan solid dalam melaksanakan kerjanya.

Selain itu, Bukhori juga mengusulkan agar para relawan memperoleh asuransi jiwa sehingga keselamatannya lebih terjamin dalam melaksanakan tugas kerelawannya.

Terkait usulan BPBD Jawa Tengah perihal perubahan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, mereka mengusulkan supaya koordinasi antara BPBD dan BNPB bersifat vertikal agar lebih cepat dan efisien. Selain itu, untuk jabatan ketua BPBD tingkat Kabupaten dijabat oleh eselon dua dan tidak bersifat *ex officio*. Terakhir, mereka juga

mengusulkan agar anggaran BPBD dimasukan dalam Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dalam agenda reses tersebut, Bukhori menegaskan bahwa Komisi VIII menaruh perhatian serius pada isu kebencanaan. Salah satunya melalui RUU tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Melalui RUU tersebut diharapkan mampu menghasilkan landasan yuridis bagi penguatan BNPB.

“Kami berharap momentum perubahan UU No. 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana tersebut mampu membentuk pola pikir (mindset) pembangunan nasional sehingga mampu menjadi solusi bagi negara di tengah kondisi rawan bencana. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi dari semua kekuatan dan pemegang kekuasaan di setiap lini pemerintahan. Selain itu, kami juga mendorong agar BPBD tidak hanya menjadi “pembersih”, sehingga sistem pembangunan nasional harus mengacu pada peta potensi





KOMISI IV

Tinjau Penanaman Bawang Putih di Rinjani

Anggota Komisi IV DPR R Johan Rosihan bersama Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan ke lokasi Taman Nasional Rinjani dan Peninjauan Bawang Putih, di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Selasa, 2 Maret 2020. #KunkerDPR

Foto dpr.go.id

KOMISI VI

Tinjau KUR di Aceh

Banda Aceh (01/03) — Kunjungan reses kerja Komisi VI DPR RI dalam rangka peninjauan ke Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Banda Aceh, Provinsi Aceh Jumat, 28 Februari 2020 turut serta hadir legislator PKS asal Aceh, Rafli. serta sejumlah anggota di komisi terkait.

KOMISI I

Rapat dengan LPP RRI Banjarmasin

Tim Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almayahari menggelar pertemuan dengan Dewan Pengawas Dan Direksi Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI dan Kepala Stasiun RRI Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat, 28 Februari 2020.

News/Foto : dpr.go.id

OLEH-OLEH DAPIL

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Dr. H. Mulyanto, M.Eng

Iqro: Jendela Ilmu

Tangsel (06/03) — IQRO, layanan kacamata gratis, digelar Aleg DPR RI Fraksi PKS, Dr.H.Mulyanto, M.Eng. di Kec. Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten.

Masyarakat antusias dapat membaca (IQRO) kembali dengan nyaman, membuka jendela ilmu dan pencerah jiwa

Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P.,M.M

Kunker Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Makassar (03/03) – Anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin mengta melakukan kunjungan kerja di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lonrae, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Rabu (03/03/2020). Dalam kunjungan itu, Andi Akmal mensosialisasikan program Safari Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makanan Ikan).

Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag.,M.Si

Media Gathering

Jakarta (02/03) — Anggota DPR RI Fraksi PKS Dapil DKI Jakarta I Anis Byarwati menyelenggarakan Media Gathering bersama para awak media di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, pada Rabu (4/3/2020).



H. Suryadi Jaya Purnama, S.T.

Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si.

Hj. Nevi Zuairina

Serap Aspirasi Wirausahawan Muda Lombok

Lombok (01/03) — Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil NTB

H. Suryadi Jaya Purnama, S.T. mengisi waktu reses dengan melakukan serap aspirasi bersama para wirausahawan Muda, di Hotel Idoop pada Ahad 1 Maret 2020

Foto : Suparman

Reses bersama Walikota Jaksel

Jakarta (06/03) — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Kurniasih Mufidayati menggelar reses di Ruang Rapat Walikota Jakarta Selatan, Jumat 6 Maret 2020. Hadir dalam acara ini Walikota Jakarta Selatan Marullah Matali beserta jajarannya.

Pelatihan Sabut kelapa untuk UMKM

Padangpariaman (07/03) — Anggota Komisi VI DPR, Nevi Zuairina pada saat reses masa sidang II bersama dengan mitra komisi VI DPR, PT Angkasa Pura II Cabang Bandara Internasional Minangkabau (BIM) mengadakan pelatihan sabut kelapa untuk UMKM yang dimulai Kamis (5/3) hingga Rabu (11/3) mendatang.

OLEH-OLEH DAPIL

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



H. Iskan Qolba Lubis, M.A.

Reses di Kota Sibolga dan Kab Tapteng

Sumut (6/3) - Anggota DPR RI dapil sumut Iskan Qolba Lubis, melakukan reses dan serap aspirasi di Kota Sibolga dan Kab. Tapteng, Sumatera Utara pada Jumat (6/3). Dalam kesempatan tersebut menyampaikan dan mensosialisasikan 2 RUU yang sedang diperjuangkan PKS, yaitu RUU Ketahanan Keluarga dan RUU Perlindungan Tokoh agama dan Simbol Agama. Bahkan saat ini RUU KK sudah sampai tahap Harmonisasi.

Habib Aboe Bakar Alhabsyi,

Sambangi Mapolda Kalsel

Banjarmasin (07/03) – Anggota DPR RI Fraksi PKS Aboe Bakar Alhabsyi mengapresiasi pengamanan yang dilakukan oleh Polda Kalsel dalam Haul Sekumpul Ke 15 beberapa waktu lalu, sebagaimana disampaikan kepada Kapolda Kalsel Irjen Yazid Fanani saat kunker reses di Mapolda Kalsel, Jumat (06/03/2020).

Dr. H. Mulyanto, M.Eng

Rumah Blandongan

Rumah dengan Teras luas tempat berkumpul anggota keluarga. Bercengkerama setelah lelah aktivitas seharian. Ciri khas rumah masyarakat Betawi Ora, betawi pinggir di Tangerang Selatan, Banten. Betawi pinggir, secara makna memang berada jauh dari pusat kekuasaan dan pusat kebudayaan, jauh dari hiruk pikuk.



H. Rofik Hananto, S.E

Kunker di SMP N 5 Mrebet

Purbalingga (07/03) — Anggota DPR RI Fraksi PKS H. Rofik Hananto, SE melakukan kunjungan kerja perseorangan di SMPN 5 Mrebet Purbalingga pada Sabtu 7 Maret 2020.

H. Rofik Hananto, S.E

Berikan Motivasi Ortu dan Siswa

Purbalingga (07/03) — Anggota DPR RI Fraksi PKS H. Rofik Hananto, SE melakukan kunjungan kerja perseorangan dengan memberikan Motivasi kepada Para Siswa dan Orang Tua Murid di SMPN 5 Mrebet pada Sabtu 7 Maret 2020.

Dr. H. Mulyanto, M.Eng

Iqro: Jendela Ilmu

Tangsel (06/03) — IQRO, layanan kamacata gratis, digelar Adeg DPR RI Fraksi PKS, Dr.H.Mulyanto, M.Eng. di Kec. Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten.

Masyarakat antusias dapat membaca (IQRO) kembali dengan nyaman, membuka jendela ilmu dan pencerah jiwa



KH Toriq Hidayat, Lc

Kunjungan Siswi SMAN 7 Tasikmalaya

Jakarta (03/03) — Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS, Toriq Hidayat, kedatangan siswi siswi kelas 10 SMA negeri 7 Tasikmalaya di Gedung DPR RI, Jumat, (28/03/2020). Kedatangan Rombongan SMA negeri 7 Tasikmalaya ke DPR RI merupakan kegiatan Studi Tour yang dilaksanakan setiap Tahun. Kegiatan ini dalam rangka memperkenalkan lembaga-lembaga pemerintahan di Indonesia.

Amin Ak

Silaturahmi Tokoh di Desa Jamintoro

Jember (05/03) — Anggota Fraksi PKS DPR RI Amin Ak melakukan silaturahmi di Desa Jamintoro Kecamatan Sumber Baru Jember. Bersama Kyai Abdul Rahman dan Beberapa tokoh Laskar Sakera. dilanjutkan Sosialisasi RUU Ketahanan Keluarga. dalam kesempatan tersebut Amin menyerap aspirasi Permodalan untuk usaha kerajinan kayu dan pisanisasi air bersih di desa darangan. Pavinggisasi jalan dan rehab masjid

H. Alifuddin, S.E.,M.M.

Tinjau Kesiapan RSUD di Kalbar hadapi Corona

Pontianak (06/03) – Anggota DPR RI komisi IX asal Kalbar Alifudin melakukan Kunjungan Lapangan Komisi IX terkait kesiapan RSUD di Kalbar menghadapi Covid-19, Kamis (5/3/2020) di RSUD Kota Pontianak Sultan Syarif Muhammad Al Kadrie, “Kunjungan lapangan kali ini sangat spesial, karena terkait kesiapan dan kesiagaan Rumah Sakit menghadapi dampak virus corona” tutur Alifuddin.

OLEH-OLEH DAPIL

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Amin Ak

Kunjungan ke pengrajin Kayu

Jember (05/03) — Anggota Fraksi PKS DPR RI Amin Ak melakukan silaturahmi ke Usaha Pengrajin Kayu didampingi Kepala Desa Darungan Kecamatan Tanggul, Jember. dalam kesempatan tersebut Amin menyerap aspirasi berupa Permodalan untuk usaha kerajinan kayu dan pibanisasi air bersih di Desa Darungan.



H. Muhammad Nasir Djamil, M.Si

Seminar Penyelesaian Korupsi dan Kasus HAM

Lhokseumawe (05/03) — Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Nasir Djamil hadir sebagai narasumber dalam Seminar Nasional dengan tema Revitalisasi Pancasila Dalam Penyelesaian Korupsi dan Pelanggaran HAM di Indonesia Pada Era Post-Truth dalam rangkaian kegiatan Unimal Constitutional Week yang berlangsung di GOR Unimal, Cunda, Lhokseumawe (04/03/2020).



Amin Ak

Silaturahmi Ma'had Ibnu Katsir Jember

Jember (05/03) — Anggota Fraksi PKS DPR RI Amin Ak berkesempatan para santri muda Ma'had Ibnu Katsir Jember. Tempat ini merupakan pondok begi para penghafal qur'an dengan pendidikan formal jenjang S-1.



KH Toriq Hidayat, Lc

Tinjau Lokasi Longsor di Cisayong

Tasikmalaya (05/03) — Saat reses DPR RI, Anggota Komisi I Toriq Hidayat mendapatkan informasi dari Pengurus Cabang PKS Cisayong bahwa terjadi musibah tanah longsor di daerahnya. Cuaca buruk menyebabkan bencana longsor di Desa Santanamekar Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Jumat (28/02/2020).

H. Suryadi Jaya Purnama, S.T.

Serap Aspirasi Kepala Desa di Lombok Tengah

Lombok (02/03) — Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil NTB H. Suryadi Jaya Purnama, S.T. melakukan dialog yang sekaligus sebagai sarana menyerap Aspirasi para kepala desa dan tokoh masyarakat Lombok Tengah pada senin 2 Maret 2020. Bertempat di Surf Cafe Pantai Grupuk. Suryadi yang biasa dipanggil SJP mera-sakan banyak kekhawatiran warga akan eksistensi KEK Mandalika pasca F1 Selesai. Foto : Suparman.

Dr. H. Jazuli Juwaini, MA

Syukuran Milad

Ketua Fraksi PKS DPR RI Dr. H. Jazuli Juwaini, MA selenggarakan syukuran dalam rangka hari miladnya dengan kegiatan Sarapan dan Doa Bersama dengan para santri dan Guru SDIT Al Ummah. Senin, 02 Maret 2020



Dr. H. Jazuli Juwaini, MA

Sosialisasi UU Desa di Arja Tani

Kabupaten Serang (08/03) - Ketua Fraksi PKS DPR RI Dr. H. Jazuli Juwaini, MA memanfaatkan waktu resesnya dengan menjumpai konstituennya dalam Sosialisasi UU No. 6 tahun 2014 Tentang Desa. di Desa Arja Tani, Kecamatan Kramat Watu, Kabupaten Serang Banten pada Ahad 08 Maret 2020.

Hj. Sakinah Aljufri, S.Ag.

Hadiri Pelatihan Perempuan Siaga

Jakarta (08/03) — Memanfaatkan masa reses Anggota DPR RI Fraksi PKS Sakinah Aljufri, menghadiri Latansa (Pelatihan Perempuan Siaga) yang dilaksanakan DPW PKS Sulteng, di bu-mi perkemahan Oloboju, yang dilaksanakan 7-8 Maret 2020. Dalam sambutannya anggota Komisi X DPR RI menyampaikan terima kasih kepada seluruh kader PKS.

Habib Aboe Bakar Alhabsyi

Haul Abah Guru Sekumpul Ke 15

Kalimantan (02/03) — Dalam rangkaian reses, Anggota DPR RI Aboe Bakar Alhabsyi mengahdiri Haul sekumpul yang juga dihadiri para haba dan ulama di Kalimantan, Ahad, (01/03/2020). Menurut pria yang akrab disapa Habib Aboe ini menyatakan Haul sekumpul ini membawa makna yang mendalam untuk bangsa dan negara.

OLEH-OLEH DAPIL



Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A., M.A

KH. Bukhori, Lc., M.A

H. Muhammad Nasir Djamil, M.Si

Temu Kader di Depok

Memenuhi masa reses kedua, Anggota DPR RI Nur Azizah Tamhid menggelar pertemuan bersama kader dan simpatisan PKS di RM Dapur Wonogiri Jl. Tole Iskandar No. 07 Sukamaju Cilandong Depok. Nur Azizah Tamhid mengadakan reses bersama anggota DPRD Kota Depok Muhammad Suparyono & Pengurus MT Al-Mubarakah Sukmajaya Jum'at, (06/03/2020).

Kunker ke Kantor BPBD Jateng

Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf melakukan kunjungan kerja ke kantor BPBD Jawa Tengah, Jumat (6/3/2020). dalam kesempatan tersebut Bukhori menyatakan bahwa Jawa Tengah termasuk wilayah dengan potensi bencana yang tinggi. Hal ini sejalan dengan data yang dirilis oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah yang mencatat telah terjadi 2.179 kasus bencana alam sepanjang 2019.

Diskusi Pencegahan Narkoba di Aceh

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil melakukan diskusi pemberantasan Narkoba bersama Kepala BNNP Aceh (Brigjend Pol Drs Heru Pranoto M.Si), Ikatan Keluarga Anti Narkoba (IKAN) dan para penggiat Anti Narkoba. Penyalahgunaan narkoba saat ini sudah pada fase sangat mengkhawatirkan, oleh karenanya, kerja-kerja pemberantasan narkoba tidak bisa dilakukan dengan kerja biasa, melainkan dengan upaya-upaya luar biasa.

OLEH-OLEH DAPIL

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA

Kompetisi Catur Bersama Warga

Jakarta (02/03) — Anggota DPR RI Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) memanfaatkan waktu resesnya untuk mengikuti kompetisi catur bersama warga di Jakarta Selatan, Sabtu, (29/02/2020). HNW yang juga Wakil Ketua MPR RI ini menyatakan bahwa Catur sebagai olahraga sangat baik dikembangkan.

Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag.,M.Si.

Media Gathering

Jakarta (02/03) — Anggota DPR RI Fraksi PKS Dapil DKI Jakarta I Anis Byarwati menyelenggarakan Media Gathering bersama para awak media di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, pada Rabu (4/3/2020). pada kesempatan tersebut, Anis menyinggung persoalan ekonomi nasional yang sudah goyang tanpa adanya wabah virus Corona. Walaupun, diakui Anis, wabah virus Corona mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, SP,MM

Kunker tempat lelang Ikan (TPI) Lonrae

Makassar (03/03) – Anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin mengta melakukan kunjungan kerja di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lonrae, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Rabu (03/03/2020). Dalam kunjungan itu, Andi Akmal mensosialisasikan program Safari Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makanan Ikan).

PROFIL

H. AHMAD SYAIKHU



Ketemu lagi dalam sesi #KeluargaPKS, mengenal lebih dekat Anggota FPKS DPR RI dan sisi unik lainnya. Pekan ini kita akan berkenalan dengan Anggota Fraksi PKS yang *Asyik* dan kharismatik, Ahmad Syaikh dari daerah pemilihan Jawa Barat VII. Yup Wakil Walikota Bekasi periode 2013 s.d 2018.

Kita akan berkenalan dengan Ahmad Syaikh, meski tinggal Bekasi insyaAllah tidak perlu tunjukan paspor

Bapak tiga pasang anak yang gemar olahraga bulutangkis ini dilahirkan di desa Ciledugkulon, Kecamatan Ciledug,

Kabupaten Cirebon pada 23 Januari 1965, putra kelima dari pasangan ulama bersahaja, K.H Ma'soem bin Aboelkhair, dan Nafi'ah binti Thohir.

Per 1 Oktober 2019 Ahmad Syaikhu mengemban amanah sebagai Anggota DPR RI di Komisi V dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Komisi yang membidangi infrastruktur, transportasi, perhubungan dan desa. Cocok dengan kompetensi dan pengalaman Ahmad Syaikhu.

Mengawali karir sebagai birokrat Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dari rentang 1986-

2004 menjadi Auditor pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Kini Syaikhu menemukan jalan sebagai politisi di PKS. Komitmen yang kuat menjadi karakteristik yang melekat pada Syaikhu. Dimanapun dan kapanpun ditempatkan senantiasa dijalankan dengan ikhtiar terbaik, buktinya saat menjadi anggota DPRD Kota Bekasi, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dan Wakil Walikota Bekasi. Amanah datang dan pergi sebagai Titipan Allah SWT, ringan mengalir tanpa beban.

Pun dalam keluarga, Syaikhu menanamkan nilai-nilai Agama dan integritas menjadi salah satu pilar penting. Agar pada akhirnya mampu menciptakan ketahanan keluarga yang mampu memberi kontribusi bagi entitas yang lebih luas.

Pesan Syaikhu untuk keluarga Indonesia "Bangun keluarga harmonis yang sakinah, mawaddah wa rahmah karena akan menjadi basis kesuksesan dunia akhirat"

SOCMED

Untuk mengetahui sepak terjang Ahmad Syaikhu dapat mengikuti social media:

Facebook : Ahmad Syaikhu
Twitter : @syaikhu_ahmad
Instagram : @syaikhu_ahmad_

”

Bangun keluarga harmonis yang sakinah, mawaddah wa rahmah karena akan menjadi basis kesuksesan dunia akhirat





Ketahui segala informasi
terkini ikhtiar politik
PKS di Parlemen

Kunjungi

**KANAL RESMI
FRAKSI PKS
DPR RI**

fraksi.pks.id



Website
fraksi.pks.id



Instagram
[fraksipksdpri](https://www.instagram.com/fraksipksdpri)



Twitter
[@fraksipksdpri](https://twitter.com/fraksipksdpri)



Facebook
Fraksi PKS DPR RI



Youtube
PKSTV DPR RI